



KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR : KEP/1125/X/KA/PR.01.01/2023/BNN

TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT UTAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2024

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas, ekonomis, efisien, transparan, dan akuntabel serta sebagai tindak lanjut operasional kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional Tahun 2024 maka diperlukan adanya penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional Tahun 2024;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

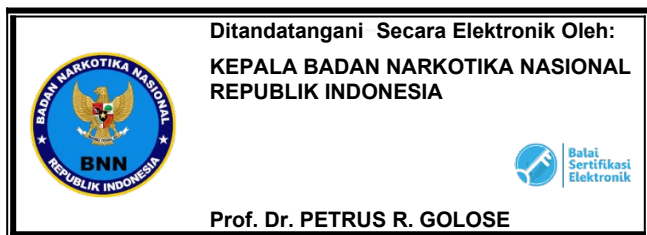
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;
12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
13. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
14. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024;
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Narkotika Nasional Tahun 2023 Satuan Kerja Inspektorat Utama Nomor : SP DIPA-066.01.1.681600/2023 tanggal 30 November 2022;
16. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/1128/XII/KA/PR.01/2022/BNN tanggal 30 Desember 2022 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2023;
17. Rencana Kerja Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional Tahun 2023;
18. Surat Perintah Inspektur Utama BNN Nomor: Sprin/1203/X/IR/PR.01.01/2023/INS tanggal 2 Oktober 2023 tentang Tim Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Utama Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT UTAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2024
- KESATU : Memberlakukan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, dan VI Keputusan ini.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas bagi seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 19 Oktober 2023





PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT UTAMA TA. 2024



www.bnn.go.id/ittama



Gedung Praja Gupta

Jl. M. T. Haryono No. 11 Cawang-Jakarta Timur

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BNN
NOMOR : KEP/ /X/KA/PR.01.01/2023/BNN
TANGGAL: OKTOBER 2023

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN (PKPT) TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Utama Tahun Anggaran (PKPT Ittama T.A.) 2024.

PKPT digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan selama satu tahun anggaran 2024 yang meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta memuat kebijakan pengawasan, program pengawasan, anggaran dan alokasi waktu.

Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan ini diharapkan dapat menjadi upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat Utama dan hasil pengawasan dapat digunakan sebagai umpan balik peningkatan kinerja dan kebijakan di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional Tahun 2024 ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Inspektorat Utama dalam mengawal program-program Badan Narkotika Nasional.

Jakarta, Oktober 2023

Inspektur Utama Badan Narkotika Nasional



Drs. Wahyono, M.H., CFA, CGCAE.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR BAGAN	v
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Ruang Lingkup	3
D. Tugas Fungsi	4
E. Struktur Organisasi	4
F. Subjek Pengawasan Intern dan Peran Dalam Pengawasan	5
G. Wilayah dan Objek Pengawasan Internal	9
H. Ketentuan Umum	11
BAB II KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN T.A. 2023	15
A. Mandatory Pengawasan Intern	15
B. Penetapan Pola Pengawasan Intern	16
C. Penetapan Bidang Tugas Koordinator Pengawasan	18
BAB III PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN	23
A. Audit	23
B. Reviu	24
C. Evaluasi	25
D. Pemantauan	26
E. Kegiatan Pengawasan Lainnya	27

BAB IV	PEMETAAN RISIKO OBJEK AUDIT 2024	29
A.	Profil dan Faktor Risiko	29
B.	Skor Analisis Risiko	32
C.	Matriks Pemetaan Risiko	45
D.	Hasil Pemetaan Risiko Berupa Zonafikasi	61
1.	Zonafikasi Untuk Inspektorat I	61
2.	Zonafikasi Untuk Inspektorat II	63
3.	Zonafikasi Untuk Inspektorat III	64
 BAB V	 PENUTUP	 66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Objek Pengawasan Intern.....	9
Tabel 2.1 Penetapan Bidang Tugas Koordinator Pengawasan..	18
Tabel 4.1 Penetapan Faktor Risiko di Lingkungan BNN TA. 2023 Untuk Penyusunan PKPT TA 2024.....	30
Tabel 4.2 Hasil Rekapitulasi Penilaian Analisis Risiko Satuan Kerja di Lingkungan BNN Tahun 2023.....	32
Tabel 4.3 Matriks Pemetaan Risiko Satuan Kerja di Lingkungan BNN.....	45
Tabel 4.4 Zonafikasi Satuan Kerja Inspektorat I Tahun 2023....	61
Tabel 4.5 Zonafikasi Satuan Kerja Inspektorat II Tahun 2023...	63
Tabel 4.6 Zonafikasi Satuan Kerja Inspektorat III Tahun 2023...	64

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Utama BNN.....	5
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Wilayah Pengawasan Intern.....	9
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Oleh karena itu, peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di dalam mengawal serta mengawasi proses keberlangsungan SPIP menjadi strategis dan krusial dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi nasional Indonesia tanpa mengurangi sedikitpun mutu substansi dari tujuan SPIP tersebut.

Peran APIP akan menjadi berbobot ketika dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi secara *equivalen* terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan manajemen risiko yang adaptif dan handal, serta berjalannya sistem pengendalian yang baik untuk mencapai tujuan organisasi. Peran APIP dikatakan sebagai *catalyst of change* atau katalisator perubahan yang berfungsi untuk memberikan sumbangsih mutu keyakinan terbatas yang handal dan terpercaya, memberikan kontribusi layanan konsultan yang membangun terhadap organisasi, mampu mengasistensi dalam mendorong upaya-upaya perbaikan untuk pengembangan organisasi yang penyesuaian terhadap perubahan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara kinerja dan keuangan.

Dalam rangka mendukung peran APIP yang semakin strategis diperlukan kombinasi harmonis antara APIP yang kompeten dengan sistem dan metodologi/teknik pengawasan yang tepat guna

mewujudkan APIP sebagai katalisator perubahan tersebut menyandang predikat *trusted advisor*.

Sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP disebutkan bahwa metode pengawasan internal dilakukan dengan teknik Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya. Kegiatan pengawasan internal Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional (Inspektorat Utama BNN) sesuai Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional telah selaras dengan Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor: KEP-001/AAIPI/DPN/2021 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

Implementasi kegiatan pengawasan internal Inspektorat Utama BNN Tahun Anggaran 2024 mempedomani Standar Audit Intern AAIPI. Salah satu bentuk konsistensi pencapaian keberhasilan yang diperoleh Inspektorat Utama BNN pada tahun 2023, yakni berhasil memperoleh sertifikasi SNI ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu dan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan berhasil mempertahankan SNI ISO tersebut sejak tahun 2018. Perolehan capaian ini sebagai bentuk komitmen dan tanggungjawab pimpinan dan seluruh pegawai Inspektorat Utama BNN untuk menjamin mutu kerja yang dihasilkan dan komitmen anti gratifikasi dan penyuapan yang dilaksanakan secara terstruktur dengan menghubungkan keterkaitan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Inspektorat Utama BNN agar tepat tujuan, efektif, dan efisien maka diperlukan pedoman berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Utama BNN TA. 2024 dimaksudkan agar menjadi pedoman perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan internal Inspektorat Utama BNN pada tahun anggaran 2024.

2. Tujuan

Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Utama BNN TA. 2024 bertujuan:

- a. Kegiatan pengawasan internal dapat dilaksanakan secara terstruktur, terukur, terintegrasi dengan pencapaian IKK dan IKP dan memenuhi kaidah tertib administrasi;
- b. Menjadi Pedoman perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan bagi Inspektur, Kabag Tata Usaha dan Para Auditor serta Fungsional Umum di Lingkungan Inspektorat Utama BNN dalam mengimplementasikan kegiatan pengawasan internal Inspektorat Utama BNN pada Tahun Anggaran 2024.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Utama BNN TA. 2024 dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penjaminan Kualitas (*quality assurance*)
 - a. Audit:
 - 1) Audit Kinerja; dan
 - 2) Audit Dengan Tujuan Tertentu.
 - b. Reviu.
 - c. Evaluasi.
 - d. Pemantauan.
2. Kegiatan Pengawasan Lainnya (kegiatan *consulting*) antara lain konsultasi, bimbingan teknis, asistensi, dan sosialisasi.

D. Tugas Fungsi

Tugas dan fungsi Inspektorat Utama diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional pasal 146 dan 147. Perubahan Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022.

1. Tugas

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BNN.

2. Fungsi

Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

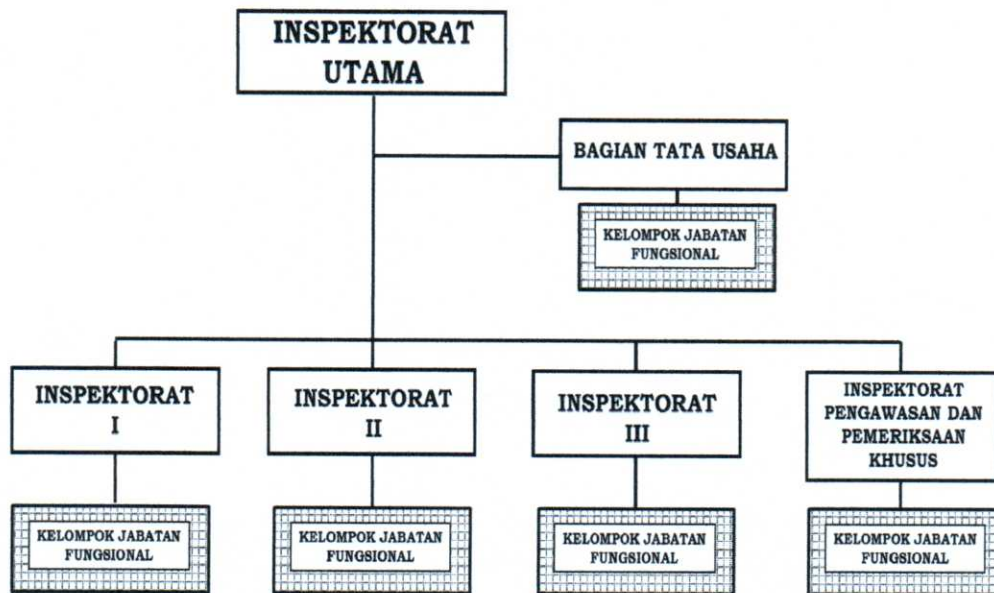
- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan BNN;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
- d. Pelaksanaan penegakan disiplin, Kode Etik Pegawai BNN, dan Kode Etik Profesi Penyidik BNN;
- e. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BNN; dan
- f. Penyusunan laporan hasil pengawasan.

E. Struktur Organisasi

Inspektur Utama terdiri atas:

1. Inspektorat I;
2. Inspektorat II;
3. Inspektorat III;
4. Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus; dan
5. Bagian Tata Usaha.

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Utama BNN



F. Subjek Pengawasan Intern dan Perannya

1. Subjek Pengawasan Internal Inspektorat Utama meliputi:
 - a. Inspektur Utama;
 - b. Inspektur I;
 - c. Inspektur II;
 - d. Inspektur III;
 - e. Inspektur Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus;
 - f. Auditor Utama dan
 - g. Para Auditor Terampil dan Auditor Ahli.
 - h. Bagian Tata Usaha.
2. Peran Subjek Pengawasan Internal antara lain:
 - a. Inspektur Utama
 - b. Inspektur I sebagai Pengendali Mutu (Daltu) Inspektorat I
 - c. Inspektur II sebagai Pengendali Mutu (Daltu) Inspektorat II
 - d. Inspektur III sebagai Pengendali Mutu (Daltu) Inspektorat III

- e. Inspektur Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus sebagai Pengendali Mutu (Daltu) Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus
 - f. Auditor Utama
 - g. Para Auditor meliputi:
 - 1) Auditor Terampil (Pelaksana, Pelaksana Lanjutan dan Penyelia) dan Auditor Pertama sebagai Anggota Tim (AT)
 - 2) Auditor Muda sebagai Ketua Tim (Katim)
 - 3) Auditor Madya sebagai Pengendali Teknis (Dalnis)
 - h. Bagian Tata Usaha
 - 1) Penyusunan rencana dan program
 - 2) Fasilitasi administrasi penyusunan laporan hasil
 - 3) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Utama
3. Tugas dari Peran Subjek Pengawasan Internal antara lain:
- Tugas dari peran subjek pengawasan intern Inspektorat Utama BNN antara lain sebagai berikut:
- a. Inspektur sebagai Koordinator Pengawas, bertugas :
 - 1) Membantu Inspektur Utama mengkoordinir dan memastikan setiap tim di Inspektorat Wilayahnya yang melaksanakan kegiatan Pengawasan Intern secara kolektif memiliki kecakapan yang dibutuhkan;
 - 2) Membantu merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - 3) Melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, asistensi dan kegiatan pengawasan lainnya.

- b. Auditor Utama, bertugas:
 - 1) Menyiapkan perumusan kebijakan pengawasan
 - 2) Mengendalikan mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain)
 - 3) Membantu kegiatan perencanaan pengawasan
 - 4) Membantu kegiatan evaluasi pengawasan.
- c. Auditor Madya, bertugas:
 - 1) Mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain)
 - 2) Melaksanakan kegiatan perencanaan pengawasan
 - 3) Melaksanakan kegiatan evaluasi pengawasan.
- d. Auditor Muda, bertugas:
 - 1) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja.
 - 2) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit aspek keuangan tertentu.
 - 3) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan evaluasi
 - 4) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu
 - 5) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pemantauan
 - 6) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pengawasan lain
 - 7) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian pengendalian dan evaluasi pengawasan.
- e. Auditor Pertama, bertugas:
 - 1) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit kinerja.
 - 2) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit atas aspek keuangan tertentu.

- 3) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi
- 4) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan reviu
- 5) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pemantauan
- 6) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pengawasan lain
- 7) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

f. Auditor Terampil, bertugas:

- 1) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit kinerja.
- 2) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit atas aspek keuangan tertentu.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan evaluasi.
- 4) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan reviu.
- 5) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan pemantauan.
- 6) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan pengawasan lain.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

- Melaksanakan penyusunan rencana dan program, serta Fasilitasi administrasi penyusunan laporan hasil pengawasan, urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Inspektorat Utama.

		Sumber Daya Manusia	Data dan Informasi	
4			Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
5			Pusat Laboratorium Narkotika	
BNNP dan BNNK/Kota				
1	BNNP Lampung (5 BNNK/Kota)	BNNP Banten (3 BNNK/Kota)	BNNP Sumatera Selatan (9 BNNK/Kota)	
2	BNNP Kepulauan Riau (3 BNNK/Kota)	BNNP Kepulauan Bangka Belitung (4 BNNK/Kota)	BNNP Sumatera Utara (15 BNNK/Kota)	
3	BNNP Riau (4 BNNK/Kota)	BNNP Sumatera Barat (4 BNNK/Kota)	BNNP Aceh (10 BNNK/Kota)	
4	BNNP Kalimantan Tengah (2 BNNK/Kota)	BNNP Kalimantan Selatan (8 BNNK/Kota)	BNNP Jawa Timur (17 BNNK/Kota)	
5	BNNP Jawa Tengah (9 BNNK/Kota)	BNNP Nusa Tenggara Barat (4 BNNK/Kota)	BNNP Kalimantan Utara (2 BNNK/Kota)	
6	BNNP Jawa Barat (14 BNNK/Kota)	BNNP Kalimantan Barat (7 BNNK/Kota)	BNNP Bali (6 BNNK/Kota)	
7	BNNP Kalimantan Timur (3 BNNK/Kota)	BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta (3 BNNK/Kota)	BNNP DKI Jakarta (3 BNNK/Kota)	
8	BNNP Sulawesi Selatan (3 BNNK/Kota)	BNNP Papua Barat	BNNP Gorontalo (5 BNNK/Kota)	
9	BNNP NTT (3 BNNK/Kota)	BNNP Sulawesi Tengah (6 BNNK/Kota)	BNNP Sulawesi Utara (4 BNNK/Kota)	
10	BNNP Bengkulu (2 BNNK/Kota)	BNNP Sulawesi Tenggara (4 BNNK/Kota)	BNNP Jambi (3 BNNK/Kota)	

11	BNNP Maluku Utara (3 BNNK/Kota)	BNNP Papua (2 BNNK/Kota)	BNNP Sulawesi Barat (1 BNNK/Kota)	
12		BNNP Maluku (2 BNNK/Kota)		
Balai/Loka Rehabilitasi				
1	Loka Rehabilitasi Kalianda		Loka Rehabilitasi Deli Serdang	
2	Balai Rehabilitasi Tanah Merah			
3	Balai Rehabilitasi Baddoka			
4	Loka Rehabilitasi Batam			

H. Ketentuan Umum

Dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) ini yang dimaksud dengan :

1. Kebijakan Pengawasan Intern merupakan rencana pengawasan dalam rangka mengawal tujuan organisasi.
2. Program Kerja Pengawasan Tahunan adalah rencana dan pedoman terhadap seluruh aktivitas pengawasan intern yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan kebijakan pengawasan intern.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
4. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai objek penugasan audit oleh Auditor atau APIP.
5. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan

intern pada instansi pemerintah, Lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

6. Kendali Mutu Audit (KMA) APIP adalah metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa APIP dan Auditornya telah memenuhi kewajiban profesionalnya kepada auditi maupun pihak lain.
7. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan bahwa secara operasional telah dilaksanakan efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
8. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
9. Audit Kinerja yaitu audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang mencakup audit atas aspek ekonomi, efisiensi, dan aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.
10. Audit Tujuan Tertentu yaitu audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
11. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

12. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
14. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
15. Konsultasi (*consulting*) adalah kegiatan pelayanan terhadap pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis.
16. Bimbingan teknis adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan yang biasanya berupa tuntunan dan nasihat untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis.
17. Asistensi/Pendampingan adalah kegiatan membantu instansi/lembaga dalam rangka memperlancar tugas dan memberi nilai tambah bagi instansi/lembaga tersebut.
18. Sosialisasi adalah proses pemberian, pengadaptasian, penyesuaian, pengenalan, dan penjabaran informasi.
19. Catalyst Of Change adalah peran auditor internal sebagai katalis berkaitan dengan quality assurance, sehingga auditor internal diharapkan dapat membimbing manajemen dalam mengenali resiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi.

20. Trusted Advisor adalah menjaga dan membangun kepercayaan kepada unit kerja dan satuan kerja dilingkungan Badan Narkotika Nasional.
21. Pengembangan Kompetensi adalah upaya peningkatan karakteristik dan kemampuan kerja Aparatur Sipil Negara melalui Pendidikan dan pelatihan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.

BAB II

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN

Kebijakan Pengawasan Intern Berbasis Risiko Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024 akan memfokuskan Pengawasan pada Mutu Kinerja sesuai basis risiko yang telah melalui penilaian Maturitas Manajemen Risiko (MR). Melalui Maturitas MR tersebut maka perlakuan pengawasan masing-masing satker dimasukkan ke dalam wilayah zonafikasi.

Zonafikasi (penjelasan lebih rinci terdapat pada BAB IV) tersebut terbagi menjadi :

1. Zona merah yaitu Satker binaan,
2. Zona kuning yang merupakan Satker sentuhan, dan
3. Zona hijau sebagai Satker pantauan.

Kebijakan ini sudah diterapkan mulai T.A. 2022 sehingga pola pengawasan Ittama BNN ke depan diharapkan menjadi lebih terarah dan terstruktur untuk menuju konsistensi dalam memberikan nilai tambah bagi organisasi selain dari membantu tercapainya tujuan organisasi secara ekonomis, efektif, dan efisien.

Oleh karena itu, Kebijakan Pengawasan Intern Ittama BNN T.A. 2024 dibagi menjadi 3 (tiga) fundamental Kebijakan yaitu:

A. Mandatory Pengawasan Intern

Merupakan kebijakan pengawasan internal yang menitikberatkan pada pengoptimalan fungsi dan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Ittama BNN terhadap Program dan/atau Kegiatan Prioritas Nasional dan Kelembagaan. Kegiatan tersebut meliputi:

1. Audit Kinerja atas Program dan/atau Kegiatan Prioritas Nasional;
2. Audit Kinerja atas Aspek Perencanaan Satuan Kerja;
3. Audit Kinerja atas Operasional Satuan Kerja (Bidang Kinerja, Sarana Prasarana, Keuangan, dan Sumber Daya Manusia);

4. Audit Kinerja atas Aspek Keuangan Tertentu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
5. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT);
6. Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L);
7. Reviu Laporan Keuangan (LK);
8. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN);
9. Reviu Laporan Kinerja (LKj);
10. Evaluasi melalui Tim Penilai Mandiri dan Penjaminan Kualitas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
11. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
12. Evaluasi melalui Tim Penilai Mandiri Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI);
13. Pemantauan Tindak Lanjut; dan
14. Konsultasi bidang Pengawasan Intern.

B. Penetapan Pola Pengawasan Intern

Pola Pengawasan Intern Inspektorat Utama BNN T.A. 2024 didasarkan pada hasil perhitungan maturitas manajemen risiko yang membagi wilayah atau objek pengawasan ke dalam zonafikasi. Setiap zona memiliki karakter perlakuan pengawasan yang berbeda sesuai risiko-risiko yang telah dinilai. Kebijakan perlakuan pengawasan harus dapat menjamin agar wilayah pada zonafikasi tersebut menjadi lebih baik di tahun berikutnya.

1. Zona merah/Satker Binaan merupakan Satker-Satker dengan pola pengawasan berupa Audit sebagaimana berikut:
 - a. Satker mandatori, yaitu:
 - 1) Satker Pusat;
 - 2) Satker Eselon II Mandiri; dan
 - 3) Satker BNN Provinsi.
 - b. Satker BNN Kabupaten/Kota yang memiliki nilai PIBR >17

Pola Pengawasan berupa audit tatap muka atau *online*, antara lain:

- a. Audit Kinerja atas Program dan/atau Kegiatan Prioritas Nasional;
- b. Audit Kinerja atas Aspek Perencanaan Satuan Kerja;
- c. Audit Kinerja atas Operasional Satuan Kerja (Bidang Kinerja, Sarana Prasarana, Keuangan, dan Sumber Daya Manusia)
- d. Audit Kinerja atas Aspek Keuangan Tertentu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- e. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT).

Jumlah hari pengawasan untuk pelaksanaan Audit Kinerja adalah maksimal 7 hari pengawasan, sedangkan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) adalah 5 hari pengawasan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

2. Zona kuning/Satker sentuhan merupakan Satker-Satker dengan pola pengawasan berupa audit atau pengawasan lainnya.

Dalam pelaksanaan pengawasan lainnya, dilakukan survei pendahuluan/*screening* terlebih dahulu secara daring/*online* untuk menentukan apakah terdapat kelemahan SPI dan/atau *fraud*/penyimpangan sebagai tindakan *early warning system*.

Apabila hasil survei pendahuluan/*screening* ditemukan indikasi *fraud*/penyimpangan maka dapat dilaksanakan kegiatan audit, namun apabila ditemukan kelemahan SPI maka dapat dilaksanakan kegiatan pengawasan lainnya. Pelaksanaan audit atau pengawasan lainnya pada zona kuning dapat dilakukan secara *online*/daring maupun tatap muka.

Kegiatan pengawasan pada satker zona kuning diharapkan dapat meningkatkan status satker tersebut menjadi zona hijau.

3. Zona hijau/Satker sentuhan merupakan Satker-Satker dengan pola pengawasan berupa pengawasan lainnya.

Pada zona hijau dilakukan pengawasan lainnya secara *online/daring*. Pengawasan lainnya tersebut, diantaranya dapat berupa kegiatan konsultasi penyajian pertanggungjawaban keuangan yang sesuai dengan ketentuan, asistensi penyajian profil dan penanganan risiko satker, konsultasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta asistensi pembangunan zona integritas. Kegiatan ini bertujuan agar satker zona hijau tidak berubah menjadi zona kuning atau bahkan merah.

C. Penetapan Bidang Tugas Koordinator Pengawasan

Kegiatan pengawasan internal meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta pengawasan lainnya. Pada tataran teknis diperlukan pendelegasian bidang tugas pengawasan yang diuraikan pada matriks sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penetapan Bidang Tugas Koordinator Pengawasan

INSPEKTORAT	No.	Bidang Tugas Koordinator Pengawasan	Susunan Tim
INSPEKTORAT I	1	Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia	
	2	Pembangunan Reformasi Birokrasi – Zona Integritas BNN - Inspektorat Utama	Koordinator : Inspektur I Pengendali Mutu : Auditor Utama Pengendali Teknis : Dalnis Inspektorat I Ketua Tim : Inspektorat I Wakil Ketua : Inspektorat I Sekretaris : Inspektorat I Anggota Tim : Inspektorat I, II,III, Itwasriksus, Bag. TU Ittama
	3	TPI RB-ZI	Koordinator : Inspektur I Pengendali Mutu : Auditor Utama Pengendali Teknis : Dalnis Inspektorat I Ketua Tim : Inspektorat I Wakil Ketua : Inspektorat I Sekretaris : Inspektorat I Anggota Tim : Inspektorat I, II,III, Itwasriksus

	4	Reviu Renstra BNN	Koordinator : Inspektur I Pengendali Mutu : Auditor Utama Pengendali Teknis : Dalnis Inspektorat I Ketua Tim : Inspektorat I Wakil Ketua : Inspektorat I Sekretaris : Inspektorat I Anggota Tim : Inspektorat I, II,III, Itwasriksus
	5	Evaluasi SAKIP	Koordinator : Inspektur I Pengendali Mutu : Auditor Utama Pengendali Teknis : Dalnis Inspektorat I Ketua Tim : Inspektorat I Wakil Ketua : Inspektorat I Sekretaris : Inspektorat I Anggota Tim : Inspektorat I, 2,3, Itwasriksus, Bag. TU Ittama
	6	Reviu LKIP	Koordinator : Inspektur I Pengendali Mutu : Auditor Utama Pengendali Teknis : Dalnis Inspektorat I Ketua Tim : Inspektorat I Wakil Ketua : Inspektorat I Sekretaris : Inspektorat I Anggota Tim : Inspektorat I, II,III, Itwasriksus
	7	Pengawasan Lainnya	
INSPEKTORAT II	1	Bidang Sarpras	
	2	SPIP BNN - Inspektorat Utama	Koordinator : Inspektur II Pengendali Mutu : Auditor Utama Pengendali Teknis : Dalnis Inspektorat II Ketua : Inspektorat II Wakil Ketua : Inspektorat II Sekretaris : Inspektorat II Anggota Tim : Inspektorat I, II,III, Itwasriksus, Bag. TU Ittama
	3	Manajemen Risiko	Koordinator : Inspektur II Pengendali Mutu : Auditor Utama Pengendali Teknis : Dalnis Inspektorat II Ketua : Inspektorat II Wakil Ketua : Inspektorat II Sekretaris : Inspektorat II Anggota Tim : Inspektorat I, II,III, Itwasriksus, Bag. TU Ittama

	4	Pemantauan Tindak Lanjut (PTL)	Koordinator : Inspektur II Pengendali Mutu : Auditor Utama Pengendali Teknis : Dalnis Inspektorat II Ketua : Inspektorat II Wakil Ketua : Inspektorat II Sekretaris : Inspektorat II Anggota Tim : Inspektorat I, II,III, Itwasriksus
	5	Evaluasi PBJ	Koordinator : Inspektur II Pengendali Mutu : Auditor Utama Pengendali Teknis : Dalnis Inspektorat II Ketua : Inspektorat II Wakil Ketua : Inspektorat II Sekretaris : Inspektorat II Anggota Tim : Inspektorat I, II,III, Itwasriksus
	6	Reviu RK-BMN	Koordinator : Inspektur II Pengendali Mutu : Auditor Utama Pengendali Teknis : Dalnis Inspektorat II Ketua : Inspektorat II Wakil Ketua : Inspektorat II Sekretaris : Inspektorat II Anggota Tim : Inspektorat I, II,III, Itwasriksus
	7	Pengawasan Lainnya	
INSPEKTORAT III	1	Bidang Keuangan	
	2	Reviu RKA-K/L dan Revisi DIPA - RKA- K/L	Koordinator : Inspektur III Pengendali Mutu : Auditor Utama Pengendali Teknis : Dalnis Inspektorat III Ketua : Inspektorat III Wakil Ketua : Inspektorat III Sekretaris : Inspektorat III Anggota Tim : Inspektorat I, II,III, Itwasriksus
	3	Reviu LK BNN dan PIPK	Koordinator : Inspektur III Pengendali Mutu : Auditor Utama Pengendali Teknis : Dalnis Inspektorat III Ketua : Inspektorat III Wakil Ketua : Inspektorat III Sekretaris : Inspektorat III Anggota Tim : Inspektorat I, II,III, Itwasriksus

	4	Reviu PNB	Koordinator : Inspektur III Pengendali Mutu : Auditor Utama Pengendali Teknis : Dalnis Inspektorat III Ketua : Inspektorat III Wakil Ketua : Inspektorat III Sekretaris : Inspektorat III Anggota Tim : Inspektorat I, II,III, Itwasriksus
	5	Kapabilitas APIP	Koordinator : Inspektur III Pengendali Mutu : Auditor Utama Pengendali Teknis : Dalnis Inspektorat III Ketua : Inspektorat III Wakil Ketua : Inspektorat III Sekretaris : Inspektorat III Anggota Tim : Inspektorat I, II,III, Itwasriksus, Bag. TU Ittama
	6	UKI	Koordinator : Inspektur III Pengendali Mutu : Auditor Utama Pengendali Teknis : Dalnis Inspektorat III Ketua : Inspektorat III Wakil Ketua : Inspektorat III Sekretaris : Inspektorat III Anggota Tim : Inspektorat I, II,III, Itwasriksus, Bag. TU Ittama
	7	Pengawasan Lainnya	Koordinator : Inspektur III Pengendali Mutu : Auditor Utama Pengendali Teknis : Dalnis Inspektorat III Ketua : Inspektorat III Wakil Ketua : Inspektorat III Sekretaris : Inspektorat III Anggota Tim : Inspektorat I, II,III, Itwasriksus
ITWASRIKSUS	1	Bidang Gakplin dan Kode Etik	
	2	LHKPN	Koordinator : Irwasriksus Pengendali Mutu : Auditor Utama Pengendali Teknis : Dalnis Itwasriksus Ketua : Itwasriksus Wakil Ketua : Itwasriksus Sekretaris : Itwasriksus Anggota Tim : Inspektorat I, II,III, Itwasriksus

	3	Monitoring Pelaporan SPT	Koordinator : Irwasriksus Pengendali Mutu : Auditor Utama Pengendali Teknis : Dalnis Irwasriksus Ketua : Irwasriksus Wakil Ketua : Irwasriksus Sekretaris : Irwasriksus Anggota Tim : Inspektorat I, II,III, Irwasriksus
	4	UPP/WBS	Koordinator : Irwasriksus Pengendali Mutu : Auditor Utama Pengendali Teknis : Dalnis Irwasriksus Ketua : Irwasriksus Wakil Ketua : Irwasriksus Sekretaris : Irwasriksus Anggota Tim : Inspektorat I, II,III, Irwasriksus
	5	UPG/Stranas KPK	Koordinator : Irwasriksus Pengendali Mutu : Auditor Utama Pengendali Teknis : Dalnis Irwasriksus Ketua : Irwasriksus Wakil Ketua : Irwasriksus Sekretaris : Irwasriksus Anggota Tim : Inspektorat I, II,III, Irwasriksus
	6	Pengawasan Lainnya	
BAG TU ITTAMA			
	1	Penilaian Kinerja Pegawai	Penanggungjawab: Irtama Pengendali Mutu : Para Inspektur Pengendali Teknis : Kabag TU Ketua : Bag. TU Wakil Ketua : Bag. TU Sekretaris : Bag. TU Anggota Tim : Inspektorat I, II,III, Irwasriksus, Bag. TU Ittama

BAB III

PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN

A. Audit

Kegiatan audit yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BNN T.A. 2024 adalah Audit Kinerja dan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT). Audit Kinerja yang dilakukan antara lain:

1. Audit Kinerja T.A 2024 atas Program dan/atau Kegiatan Prioritas Nasional;
2. Audit Kinerja atas Operasional Satuan Kerja (Bidang Kinerja, Sarana Prasarana, Keuangan dan Sumber Daya Manusia);
3. Audit Kinerja T.A 2024 atas Aspek Keuangan Tertentu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tahapan Audit Kinerja di lingkungan Inspektorat Utama BNN sebagai berikut:

1. Perencanaan Audit:
 - a. Pemahaman objek audit dan identifikasi masalah;
 - b. Pemahaman sistem pengendalian intern;
 - c. Penentuan tujuan dan lingkup audit;
 - d. Penentuan kriteria audit;
 - e. Pengidentifikasian jenis bukti dan prosedur audit;
 - f. Penyusunan Program Kerja Audit (PKA).
2. Pelaksanaan Audit:
 - a. Perolehan dan pengujian data;
 - b. Penyusunan dan penyampaian notisi audit;
 - c. Pembahasan notisi audit
 - d. Perolehan tanggapan resmi dan tertulis atas notisi audit;
 - e. Penyampaian rekomendasi atas notisi audit.
3. Pelaporan Hasil Audit:
 - a. Penyusunan konsep Laporan Hasil Audit (LHA);

- b. Penyusunan dan penyampaian Laporan Hasil Audit (LHA) kepada Kepala BNN;
- c. Batas waktu penyelesaian Laporan Hasil Audit (LHA) adalah maksimal 3 (tiga) hari setelah berakhirnya rangkaian kegiatan audit yang dilaksanakan.

Tahapan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) di lingkungan Inspektorat Utama BNN diatur didalam Pedoman dan terpisah dari PKPT ini. Setiap tahapan Audit Kinerja dan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) didokumentasikan secara *hardcopy* atau *softcopy* oleh Tim Audit.

B. Reviu

Reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama BNN T.A. 2024 antara lain: Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Reviu Laporan Keuangan, Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), Reviu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Reviu Manajemen Risiko, Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Reviu Rencana Strategis (Renstra), Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN), dan Reviu Lainnya. Tahapan pelaksanaan Reviu sebagai berikut:

1. Perencanaan Reviu disusun oleh Ketua Tim Reviu pada setiap penugasan reviu dan dituangkan ke dalam Program Kerja Reviu (PKR) sebagai berikut:
 - a. Penetapan tujuan dan sasaran reviu;
 - b. Penetapan ruang lingkup reviu;
 - c. Penetapan metodologi dan Kertas Kerja Reviu (KKR);
 - d. Penetapan pegawai dan susunan tim reviu;
 - e. Penetapan waktu reviu;
 - f. Biaya reviu.
2. Pelaksanaan Reviu:
 - a. Pengumpulan data/dokumen reviu;

- b. Pengolahan dan analisa data/dokumen revid;e
 - c. Pembahasan bersama konsep CHR antara APIP dengan Pembina Fungsi;
 - d. Penyusunan Catatan Hasil Revid;e (CHR);
 - e. Penyataan telah direvid;e
 - f. Penyusunan Laporan Hasil Revid;e (LHR).
3. Pelaporan Revid;e:
- a. CHR ditandatangani berjenjang dari Perevid;e, Ketua Tim dan Pengendali Teknis;
 - b. LHR ditandatangani oleh Inspektur Utama BNN dan disampaikan kepada Kepala BNN;
 - c. Batas waktu penyelesaian Laporan Hasil Revid;e (LHR) adalah maksimal 3 (tiga) hari setelah berakhirnya rangkaian kegiatan revid;e yang dilaksanakan.

Setiap tahapan revid;e harus didokumentasikan secara *hardcopy* atau *softcopy* oleh Tim Revid;e.

C. Evaluasi

Evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BNN T.A. 2024 antara lain: Evaluasi Program/Kegiatan Prioritas, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-AKIP), Evaluasi Tim Penilaian Internal/Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (TPI/PMP-RB), Evaluasi melalui Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Evaluasi melalui Tim Penilaian Internal Zona Integritas (TPI-ZI), dan Evaluasi Lainnya. Tahapan pelaksanaan Evaluasi sebagai berikut:

1. Perencanaan Evaluasi:

Perencanaan evaluasi harus disusun oleh Ketua Tim Evaluasi pada setiap penugasan evaluasi dan dituangkan ke dalam Program Kerja Evaluasi (PKE) yang terdiri sebagai berikut:

- a. Penetapan tujuan dan sasaran evaluasi;

- b. Penetapan ruang lingkup evaluasi;
 - c. Penetapan Metodologi dan Kertas Kerja Evaluasi (KKE);
 - d. Penetapan pegawai dan susunan tim evaluasi;
 - e. Penetapan waktu evaluasi.
 - f. Biaya evaluasi.
2. Pelaksanaan Evaluasi:
- a. Pengumpulan data/dokumen evaluasi;
 - b. Pengolahan dan analisa data/dokumen;
 - c. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE).
3. Pelaporan Evaluasi:
- a. LHE ditandatangani oleh Inspektur Wilayah/Pengendali Mutu;
 - b. LHE disampaikan kepada Kepala BNN;
 - c. Batas waktu penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi (LHE) adalah maksimal 3 (tiga) hari setelah berakhirnya rangkaian kegiatan evaluasi yang dilaksanakan.
- Setiap tahapan evaluasi harus didokumentasikan secara *hardcopy* atau *softcopy* oleh Tim Evaluasi.

D. Pemantauan

Pemantauan yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BNN T.A. 2024 antara lain: Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) Hasil Audit BPK RI dan APIP BNN, Pemantauan Program dan/atau Kegiatan Prioritas Nasional, Pemantauan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pemantauan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemantauan Unit Kepatuhan Internal (UKI) dan Pemantauan Lainnya. Tahapan pelaksanaan Pemantauan sebagai berikut:

1. Perencanaan Pemantauan:
- Perencanaan pemantauan harus disusun oleh Ketua Tim Pemantauan pada setiap penugasan pemantauan dan dituangkan ke dalam Program Kerja Pemantauan (PKP) dengan menetapkan sasaran dari pemantauan yang akan dilaksanakan.

2. Pelaksanaan Pemantauan:

Pemantauan dilaksanakan dengan memperhatikan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data/dokumen pemantauan;
- b. Pengolahan data/dokumen pemantauan;
- c. Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan (LHP).

3. Pelaporan Pemantauan:

Pelaksanaan pemantauan akan dilaporkan secara periodik sebagai berikut:

- a. LHP ditandatangani secara berjenjang oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu;
- b. LHP disampaikan kepada Kepala BNN;
- d. Batas waktu penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan (LHP) adalah maksimal 3 (tiga) hari setelah berakhirnya rangkaian kegiatan pemantauan yang dilaksanakan.

Setiap tahapan pemantauan harus didokumentasikan secara *hardcopy* atau *softcopy* oleh Tim Pemantauan.

E. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kegiatan pengawasan lainnya antara lain: sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, telaah sejawat dan pemaparan hasil pengawasan. Sesuai dengan tahapan pelaksanaan Pengawasan Lainnya sebagai berikut:

1. Perencanaan Kegiatan Pengawasan Lainnya:

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pengawasan lainnya dituangkan kedalam program kerja pengawasan lainnya, yang meliputi:

- a. Penetapan tujuan dan lingkup penugasan;

- b. Pemahaman lingkungan dan proses bisnis manajemen yang relevan;
 - c. Pemahaman risiko dan pengendalian;
 - d. Penentuan pendekatan penugasan;
 - e. Pengalokasian sumber daya penugasan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Lainnya
- Didalam pelaksanaan pengawasan lainnya agar dilakukan dengan prinsip efektif, efisien dan ekonomis sehingga pelaksanaannya menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
3. Pelaporan Kegiatan Pengawasan Lainnya
- Kegiatan pengawasan lainnya akan dilaporkan setiap penugasan sebagai berikut:
- a. Laporan Hasil Pengawasan Lainnya ditandatangani Pengendali Mutu;
 - b. Laporan Hasil Pengawasan Lainnya disampaikan kepada Kepala BNN;
 - c. Batas waktu penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Lainnya adalah maksimal 3 (tiga) hari setelah berakhirnya rangkaian kegiatan yang dilaksanakan.

Setiap tahapan pengawasan lainnya didokumentasikan secara *hardcopy* atau *softcopy* oleh yang melaksanakan kegiatan.

BAB IV

PEMETAAN RISIKO OBJEK AUDIT 2024

A. Profil dan Faktor Risiko

Pada Badan Narkotika Nasional terdapat 241 Unit Pemilik Risiko (UPR), terdiri dari :

1. Eselon II Satker Pusat sebanyak 29 Unit Kerja;
2. BNNP dan BNNK/Kota sebanyak 207 Unit Kerja;
3. Balai/Loka Rehabilitasi sebanyak 5 Unit Kerja.

Sebanyak 241 UPR tersebut terdapat di 223 Satuan Kerja. Basis objek audit adalah Satuan kerja, dengan demikian atas UPR yang terdapat pada level eselon II Satuan Kerja Pusat, pengakuan atas nilai risikonya dihitung sesuai Satuan Kerja Induknya, yakni eselon I.

Faktor Risiko digunakan untuk:

1. menggambarkan faktor-faktor umum yang dapat mengindikasikan tingkat risiko yang lebih tinggi dan/atau mempengaruhi penentuan prioritas pada suatu bagian dari audit universe. Dalam penyusunan PKPT ini, penggunaan faktor risiko ditujukan untuk penentuan prioritas auditable unit;
2. menyeleksi/meranking auditable unit yang akan menjadi obyek pengawasan. Faktor risiko dapat diartikan sebagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan faktor-faktor umum yang dapat mengindikasikan tingkat risiko yang lebih tinggi dan/atau mempengaruhi prioritas pada suatu bagian dari Peta Auditan.

Faktor Risiko yang digunakan pada penentuan Satker Audit di lingkungan Badan Narkotika Nasional antara lain total anggaran satuan kerja, belanja modal, realisasi anggaran tahun sebelumnya, pelaksanaan audit tahun sebelumnya, waktu penyelesaian rekomendasi hasil audit (internal dan eksternal), jumlah pengaduan masyarakat dan WBS, dan pembangunan Zona Integritas di satuan kerja.

Berdasarkan rangking tersebut, kemudian memilih risiko mana yang akan dikaitkan dengan Satker layak audit (auditable unit) dalam tahun ini, dan risiko mana yang akan dikaitkan dengan Satker layak audit.

**Tabel. 4.1 Penetapan Faktor Risiko
di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
TA. 2023 untuk penyusunan PKPT Tahun 2024**

No.	Faktor Risiko	Presentase		Kriteria	Level Risiko	Level Skor	Keterangan
1	Kebijakan Pimpinan	15%	0.94	Satker Pusat / BNNP	Risiko Sangat Tinggi	4	
				Balai	Risiko Tinggi	3	
				BNNK/ Loka	Risiko Rendah	2	
				-	Risiko Sangat Rendah	1	
2	Total Anggaran	5.00%	0.31	> 1,8 M	Risiko Sangat Tinggi	4	PAGU indikatif 2024 atau alokasi 2023
				> 1,5 s.d 1,8 M	Risiko Tinggi	3	
				>1,2 s.d 1,5 M	Risiko Rendah	2	
				≤ 1,2 M	Risiko Sangat Rendah	1	
3	Belanja Modal	5.00%	0.31	> 50 jt	Risiko Sangat Tinggi	4	RKAKL 2023
				> 25 - 50 jt	Risiko Tinggi	3	
				>0 - 25 jt	Risiko Rendah	2	
				0	Risiko Sangat Rendah	1	
4	Realisasi Anggaran Tahun Sebelumnya (semakin tinggi realisasi semakin beresiko)	5.00%	0.31	>97-100%	Risiko Sangat Tinggi	4	Penyerapan TA. 2022 Keuangan
				>95-97%	Risiko Tinggi	3	
				>92-95%	Risiko Rendah	2	
				≤92%	Risiko Sangat Rendah	1	
5	Pelaksanaan Audit Tahun Sebelumnya (Ren, Ops, Kinerja, PNBP)	20%	1.25	> 2 Tahun	Risiko Sangat Tinggi	4	Tahun 2023 yang sudah selesai dan direncanakan
				2 Tahun	Risiko Tinggi	3	
				1 Tahun	Risiko Rendah	2	
				Kurang dari 12 Bulan	Risiko Sangat Rendah	1	
6	Waktu Penyelesaian Rekomendasi LHA Jumlah Temuan Eksternal	20%	1.25	> 3 Tahun	Risiko Sangat Tinggi	4	Database Tim PTL
				2 - 3 Tahun	Risiko Tinggi	3	Karena berpengaruh terhadap ZI

	dan Internal			1 - 2 Tahun	Risiko Rendah	2	
				0 - 1 Tahun	Risiko Sangat Rendah	1	
7	Jumlah Pengaduan Masyarakat dan WBS	15%	0.94	> 2	Risiko Sangat Tinggi	4	Data Dumas BNN/UPP dan WBS Itsus 2022 dan Tahun berjalan
				2 Pengaduan	Risiko Tinggi	3	
				1 Pengaduan	Risiko Rendah	2	
				Tidak Ada Pengaduan	Risiko Sangat Rendah	1	
8	Pembangunan Zona Integritas	15%	0.94	Belum membangun	Risiko Sangat Tinggi	4	Diluar Kriteria Level 1 s.d 3
				Usulan Satker ZI dari para IR ke Tim TPI	Risiko Tinggi	3	berlaku untuk tahun 2022 s.d 2023
				Telah diajukan ke TPN	Risiko Rendah	2	berlaku untuk tahun sejak 2021
				Mendapatkan Predikat WBK atau WBBM	Risiko Sangat Rendah	1	Selama WBK WBM belum dicabut
			6.25				

B. Skor Analisis Risiko

Dalam metode Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR) terdapat perhitungan atas tiga komponen nilai untuk mendapat nilai risiko sebuah Satuan kerja, yakni : Nilai Level Maturitas Manajemen Risiko (MR); Nilai rata-rata Risk Register (RR) yang didapatkan berdasarkan hasil perkalian Rata-Rata Level Kemungkinan dan Rata-Rata Level Dampak pada pemetaan dimasing-masing satker; dan Nilai Faktor Risiko (FR). Penentuan Nilai PIBR didapatkan berdasarkan hasil perhitungan sebagai berikut :

1. Jika Level MR < 3 Maka: 100%FR
2. Jika Level MR = 3 Maka; (RRx50%)+(FRx50%)
3. Jika Level MR > 3 Maka; (RRx70%)+(FRx30%)

**Tabel. 4.2 Hasil Rekapitulasi Penilaian Analisis Risiko
Satuan Kerja di Lingkungan BNN Tahun 2023**

No.	SATKER	NILAI PIBR	Maturitas MR	Nilai Komposite	TOTAL FR	FAKTOR RISIKO							
						Kebijakan Pimpinan	Total Anggaran Tahun 2023	Belanja Modal	Realisasi Anggaran TA. 2022	Pelaksanaan Audit Tahun Sebelumnya	PTL	DUMAS	Pembangunan ZI
						0.94 FR 1	0.31 FR 2	0.31 FR 3	0.31 FR 4	1.25 FR 5	1.25 FR 6	0.94 FR 7	0.94 FR 8
1	BNN PROVINSI DKI JAKARTA	21.32	3	22	20.63	3.76	1.24	1.24	0.62	1.25	5	3.76	3.76
2	BNN KABUPATEN DONGGALA	21.03	3	23	19.05	1.88	1.24	1.24	1.24	3.75	5	0.94	3.76
3	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	21.00	3	22	19.99	1.88	1.24	0.93	1.24	5.00	5	0.94	3.76
4	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	20.97	3	21	20.93	1.88	1.24	0.93	1.24	5.00	5	1.88	3.76
5	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	20.90	3	24	17.80	1.88	1.24	1.24	1.24	3.75	3.75	0.94	3.76
6	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	20.69	3	22	19.37	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	5	0.94	3.76
7	BNN KABUPATEN	20.31	3	25	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76

No.	SATKER	NILAI PIBR	Maturitas MR	Nilai Komposite	TOTAL FR	FAKTOR RISIKO							
						Kebijakan Pimpinan	Total Anggaran Tahun 2023	Belanja Modal	Realisasi Anggaran TA. 2022	Pelaksanaan Audit Tahun Sebelumnya	PTL	DUMAS	Pembangunan ZI
						0.94	0.31	0.31	0.31	1.25	1.25	0.94	0.94
						FR 1	FR 2	FR 3	FR 4	FR 5	FR 6	FR 7	FR 8
	TANJUNG JABUNG TIMUR												
8	BNN PROVINSI SULAWESI TENGAH	20.22	3	22	18.44	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	5	1.88	3.76
9	BNN PROVINSI MALUKU	20.22	3	22	18.43	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	5	0.94	3.76
10	BNN KABUPATEN SUMENEP	19.78	3	23	16.56	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	5	1.88	3.76
11	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	19.78	3	23	16.55	1.88	1.24	1.24	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
12	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	19.78	3	23	16.55	1.88	1.24	1.24	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
13	BNN KABUPATEN BANYUMAS	19.69	3	25	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	1.88	2.82
14	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	19.62	3	23	16.24	1.88	0.93	1.24	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
15	BNN PROVINSI MALUKU UTARA	19.38	3	25	13.75	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
16	BNN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	19.38	3	25	13.75	3.76	1.24	0.62	0.93	1.25	1.25	0.94	3.76
17	BNN KABUPATEN BIMA	19.37	2	0	19.37	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	5	0.94	3.76
18	BNN KOTA PALU	19.37	2	22	19.37	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	5	0.94	3.76
19	BNN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	19.34	3	24	14.68	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	1.88	2.82
20	BNN KOTA PONTIANAK	19.34	3	24	14.67	1.88	1.24	1.24	1.24	5.00	1.25	0.94	1.88
21	DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN	19.31	3	23	15.62	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	3.76	1.88
22	BNN KOTA BONTANG	19.31	3	23	15.62	1.88	0.93	0.62	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
23	BNN KABUPATEN JAYAPURA	19.31	3	23	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
24	BNN KABUPATEN	19.31	3	23	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76

No.	SATKER	NILAI PIBR	Maturitas MR	Nilai Komposite	TOTAL FR	FAKTOR RISIKO							
						Kebijakan Pimpinan	Total Anggaran Tahun 2023	Belanja Modal	Realisasi Anggaran TA. 2022	Pelaksanaan Audit Tahun Sebelumnya	PTL	DUMAS	Pembangunan ZI
						0.94	0.31	0.31	0.31	1.25	1.25	0.94	0.94
						FR 1	FR 2	FR 3	FR 4	FR 5	FR 6	FR 7	FR 8
	MIMIKA												
25	BNN KABUPATEN KARO	19.28	3	22	16.55	1.88	1.24	1.24	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
26	BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	19.19	3	24	14.38	3.76	1.24	0.31	0.62	1.25	2.5	0.94	3.76
27	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BNN	19.19	3	24	14.37	3.76	1.24	1.24	0.93	1.25	1.25	0.94	3.76
28	BNN KOTA BANJARMASIN	19.19	3	24	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
29	BNN KABUPATEN TABALONG	19.16	3	23	15.31	1.88	0.93	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
30	BNN KABUPATEN LUMAJANG	19.15	4	20	17.18	1.88	1.24	0.93	0.93	2.50	5	1.88	2.82
31	BALAI BESAR REHABILITASI BNN	19.15	4	22	12.49	3.76	1.24	1.24	0.93	1.25	1.25	1.88	0.94
32	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	19.12	3	22	16.24	1.88	1.24	0.93	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
33	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	19.12	3	22	16.24	1.88	1.24	0.93	1.24	1.25	5	0.94	3.76
34	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	19.12	3	22	16.24	1.88	1.24	0.93	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
35	BNN KABUPATEN PELALAWAN	19.06	3	25	13.12	1.88	1.24	0.31	0.93	3.75	1.25	0.94	2.82
36	BNN KABUPATEN KUNINGAN	19.00	3	23	14.99	1.88	1.24	0.62	1.24	5.00	1.25	0.94	2.82
37	BNN KOTA TEGAL	18.81	3	22	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
38	BNN KABUPATEN SINTANG	18.81	3	22	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
39	BNN KABUPATEN SANGGAU	18.81	3	22	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
40	BNN KABUPATEN BIREUEN	18.81	3	22	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
41	BNN KOTA SABANG	18.81	3	22	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
42	BNN KABUPATEN PIDIE	18.81	3	22	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76

No.	SATKER	NILAI PIBR	Maturitas MR	Nilai Komposite	TOTAL FR	FAKTOR RISIKO							
						Kebijakan Pimpinan	Total Anggaran Tahun 2023	Belanja Modal	Realisasi Anggaran TA. 2022	Pelaksanaan Audit Tahun Sebelumnya	PTL	DUMAS	Pembangunan ZI
						0.94	0.31	0.31	0.31	1.25	1.25	0.94	0.94
						FR 1	FR 2	FR 3	FR 4	FR 5	FR 6	FR 7	FR 8
43	LOKA REHABILITASI NARKOBA BNN, KALIANDA LAMPUNG SE	18.81	3	22	15.61	3.76	1.24	1.24	1.24	5.00	1.25	0.94	0.94
44	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	18.75	3	25	12.49	1.88	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
45	BNN KOTA MALANG	18.75	3	25	12.49	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
46	BNN KABUPATEN KENDAL	18.72	3	24	13.43	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	2.82
47	BNN KABUPATEN BULELENG	18.56	3	24	13.12	1.88	1.24	0.62	1.24	1.25	1.25	1.88	3.76
48	BNN KABUPATEN CILACAP	18.56	3	24	13.11	1.88	1.24	0.93	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
49	BNN KOTA SAMARINDA	18.53	3	23	14.05	1.88	1.24	0.93	1.24	3.75	1.25	0.94	2.82
50	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	18.50	3	22	15.00	1.88	0.93	0.31	1.24	3.75	1.25	1.88	3.76
51	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	18.50	3	22	15.00	1.88	0.93	0.31	1.24	3.75	1.25	1.88	3.76
52	BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	18.40	3	24	12.80	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	1.88
53	BNN KOTA TANJUNG BALAI	18.40	3	24	12.80	1.88	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
54	BNN PROVINSI PAPUA	18.38	3	23	13.75	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
55	BNN PROVINSI SULAWESI UTARA	18.35	3	22	14.69	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	1.88	3.76
56	BNN PROVINSI SUMATERA SELATAN	18.34	3	22	14.68	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	2.82	1.88
57	BNN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	18.34	3	22	14.68	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
58	BNN KOTA PAGARALAM	18.34	3	22	14.68	1.88	1.24	0.93	0.93	3.75	1.25	0.94	3.76
59	BNN PROVINSI JAWA TIMUR	18.25	3	24	12.49	3.76	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	1.88	0.94
60	BNN KABUPATEN	18.19	3	22	14.37	1.88	0.93	0.62	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76

No.	SATKER	NILAI PIBR	Maturitas MR	Nilai Komposite	TOTAL FR	FAKTOR RISIKO							
						Kebijakan Pimpinan	Total Anggaran Tahun 2023	Belanja Modal	Realisasi Anggaran TA. 2022	Pelaksanaan Audit Tahun Sebelumnya	PTL	DUMAS	Pembangunan ZI
						0.94	0.31	0.31	0.31	1.25	1.25	0.94	0.94
						FR 1	FR 2	FR 3	FR 4	FR 5	FR 6	FR 7	FR 8
	KUBU RAYA												
61	BNN KABUPATEN KOLAKA	18.19	3	22	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
62	BNN KABUPATEN CIANJUR	18.03	3	22	14.05	1.88	1.24	0.93	1.24	3.75	1.25	0.94	2.82
63	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	18.00	3	21	15.00	1.88	0.93	0.31	0.93	5.00	1.25	0.94	3.76
64	BNN KABUPATEN BALANGAN	17.94	3	24	11.87	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
65	BNN PROVINSI SUMATERA BARAT	17.91	3	23	12.81	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	2.82
66	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	17.90	3	23	12.80	1.88	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
67	BNN PROVINSI JAMBI	17.88	3	22	13.75	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
68	BNN PROVINSI PAPUA BARAT	17.88	3	22	13.75	3.76	1.24	0.62	0.93	1.25	1.25	0.94	3.76
69	BNN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	17.87	3	22	13.74	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	2.82
70	BNN PROVINSI SULAWESI BARAT	17.87	3	22	13.74	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	2.82
71	BNN PROVINSI BANTEN	17.87	3	22	13.74	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	1.88	1.88
72	BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	17.87	3	22	13.74	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	1.88	1.88
73	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	17.87	3	22	13.74	1.88	1.24	0.93	1.24	2.50	1.25	0.94	3.76
74	BNN KOTA PALANGKARAYA	17.87	3	22	13.74	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	1.88
75	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	17.78	3	24	11.56	1.88	0.93	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
76	BNN PROVINSI SUMATERA UTARA	17.75	3	23	12.49	3.76	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	1.88
77	BNN KABUPATEN LABUHANBATU	17.72	3	22	13.44	1.88	0.93	0.31	1.24	1.25	1.25	2.82	3.76

No.	SATKER	NILAI PIBR	Maturitas MR	Nilai Komposite	TOTAL FR	FAKTOR RISIKO							
						Kebijakan Pimpinan	Total Anggaran Tahun 2023	Belanja Modal	Realisasi Anggaran TA. 2022	Pelaksanaan Audit Tahun Sebelumnya	PTL	DUMAS	Pembangunan ZI
						0.94	0.31	0.31	0.31	1.25	1.25	0.94	0.94
						FR 1	FR 2	FR 3	FR 4	FR 5	FR 6	FR 7	FR 8
	UTARA												
78	BNN KOTA CILEGON	17.72	3	22	13.43	1.88	1.24	0.62	1.24	2.50	1.25	0.94	3.76
79	BNN KABUPATEN GARUT	17.72	3	22	13.43	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	2.82
80	BNN KOTA MOJOKERTO	17.59	3	23	12.18	1.88	1.24	0.62	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
81	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	17.56	3	22	13.12	1.88	1.24	0.62	1.24	1.25	1.25	1.88	3.76
82	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	17.56	3	22	13.12	1.88	1.24	0.62	1.24	1.25	1.25	1.88	3.76
83	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	17.56	3	22	13.12	1.88	1.24	0.31	1.24	2.50	1.25	0.94	3.76
84	BNN KABUPATEN BANTUL	17.56	3	22	13.11	1.88	0.93	1.24	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
85	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	17.56	3	22	13.11	1.88	1.24	0.93	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
86	BNN KOTA TASIKMALAYA	17.50	3	20	15.00	1.88	0.93	0.31	1.24	3.75	1.25	1.88	3.76
87	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	17.49	2	0	17.49	1.88	0.93	1.24	1.24	5.00	2.5	0.94	3.76
88	BNN KOTA GORONTALO	17.49	2	12	17.49	1.88	1.24	1.24	0.93	2.50	5	0.94	3.76
89	DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	17.44	3	23	11.87	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	1.88
90	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	17.44	3	23	11.87	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
91	BNN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	17.41	3	22	12.81	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	1.88	1.88
92	BNN PROVINSI SULAWESI SELATAN	17.40	3	22	12.80	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	1.88	0.94
93	BNN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	17.40	3	22	12.80	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	1.88
94	BNN KOTA JAKARTA UTARA	17.40	3	22	12.80	1.88	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76

No.	SATKER	NILAI PIBR	Maturitas MR	Nilai Komposite	TOTAL FR	FAKTOR RISIKO							
						Kebijakan Pimpinan	Total Anggaran Tahun 2023	Belanja Modal	Realisasi Anggaran TA. 2022	Pelaksanaan Audit Tahun Sebelumnya	PTL	DUMAS	Pembangunan ZI
						0.94	0.31	0.31	0.31	1.25	1.25	0.94	0.94
						FR 1	FR 2	FR 3	FR 4	FR 5	FR 6	FR 7	FR 8
95	BNN KABUPATEN MAGELANG	17.40	3	22	12.80	1.88	0.93	0.93	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
96	SEKRETARIAT UTAMA	17.37	3	21	13.74	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	1.88	1.88
97	BNN PROVINSI BENGKULU	17.31	3	19	15.62	3.76	1.24	0.93	1.24	1.25	2.5	1.88	2.82
98	BNN KABUPATEN BATANGHARI	17.28	3	23	11.56	1.88	1.24	0.31	0.93	1.25	1.25	0.94	3.76
99	BNN KOTA KENDARI	17.28	3	18	16.55	1.88	1.24	1.24	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
100	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	17.25	3	22	12.50	1.88	0.93	0.31	1.24	1.25	1.25	1.88	3.76
101	BNN KOTA DENPASAR	17.25	3	22	12.49	1.88	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
102	BNN KOTA CIREBON	17.25	3	22	12.49	1.88	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
103	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	17.25	3	22	12.49	1.88	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
104	BNN KOTA BANJARBARU	17.25	3	22	12.49	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
105	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	17.25	3	22	12.49	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
106	BNN KABUPATEN BELU	17.22	3	16	18.43	1.88	1.24	1.24	1.24	5.00	1.25	2.82	3.76
107	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	17.09	3	22	12.18	1.88	0.93	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
108	DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN	16.94	3	22	11.87	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	1.88
109	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	16.94	3	22	11.87	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
110	BNN KOTA CIMAHI	16.94	3	22	11.87	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
111	BNN KABUPATEN SUMEDANG	16.94	3	22	11.87	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
112	BNN KABUPATEN MEMPAAWAH	16.94	3	22	11.87	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
113	BNN KABUPATEN SIDOARJO	16.93	3	22	11.86	1.88	1.24	0.62	1.24	3.75	1.25	0.94	0.94
114	BNN KOTA JAMBI	16.88	3	20	13.75	1.88	0.93	0.31	0.93	3.75	1.25	0.94	3.76

No.	SATKER	NILAI PIBR	Maturitas MR	Nilai Komposite	TOTAL FR	FAKTOR RISIKO							
						Kebijakan Pimpinan	Total Anggaran Tahun 2023	Belanja Modal	Realisasi Anggaran TA. 2022	Pelaksanaan Audit Tahun Sebelumnya	PTL	DUMAS	Pembangunan ZI
						0.94	0.31	0.31	0.31	1.25	1.25	0.94	0.94
						FR 1	FR 2	FR 3	FR 4	FR 5	FR 6	FR 7	FR 8
115	BNN KOTA PEKANBARU	16.87	3	20	13.74	1.88	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	1.88	3.76
116	BNN KOTA BANDA ACEH	16.78	3	22	11.56	1.88	0.93	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
117	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	16.78	3	22	11.56	1.88	0.93	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
118	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	16.78	3	22	11.56	1.88	1.24	0.31	0.93	1.25	1.25	0.94	3.76
119	BNN KABUPATEN BANGKA	16.78	3	22	11.56	1.88	1.24	0.31	0.93	1.25	1.25	0.94	3.76
120	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	16.75	3	21	12.49	1.88	0.93	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
121	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	16.75	3	21	12.49	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
122	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	16.62	3	22	11.24	1.88	1.24	0.62	1.24	1.25	1.25	0.94	2.82
123	BNN PROVINSI LAMPUNG	16.56	2	24	16.56	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	2.82	3.76
124	BNN KABUPATEN CIAMIS	16.47	3	22	10.93	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	2.82
125	LOKA REHABILITASI BNN, DELI SERDANG SUMATERA UTARA	16.43	3	21	11.86	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	0.94
126	BNN KOTA BINJAI	16.34	3	18	14.68	1.88	1.24	0.62	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
127	BNN KABUPATEN LANGKAT	16.25	3	20	12.49	1.88	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
128	BNN KABUPATEN SLEMAN	16.25	3	20	12.49	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
129	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	16.24	2	22	16.24	1.88	1.24	1.24	1.24	3.75	1.25	1.88	3.76
130	BNN KOTA TARAKAN	16.24	2	0	16.24	1.88	1.24	0.93	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
131	BNN KABUPATEN MUNA	16.24	2	18	16.24	1.88	1.24	0.93	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
132	BNN KOTA TEBING TINGGI	16.24	1	0	16.24	1.88	1.24	0.93	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76

No.	SATKER	NILAI PIBR	Maturitas MR	Nilai Komposite	TOTAL FR	FAKTOR RISIKO							
						Kebijakan Pimpinan	Total Anggaran Tahun 2023	Belanja Modal	Realisasi Anggaran TA. 2022	Pelaksanaan Audit Tahun Sebelumnya	PTL	DUMAS	Pembangunan ZI
						0.94	0.31	0.31	0.31	1.25	1.25	0.94	0.94
						FR 1	FR 2	FR 3	FR 4	FR 5	FR 6	FR 7	FR 8
133	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	16.24	2	18	16.24	1.88	1.24	0.93	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
134	BNN KABUPATEN ASAHAN	16.24	2	22	16.24	1.88	1.24	0.93	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
135	BNN KOTA TUAL	16.24	2	22	16.24	1.88	1.24	1.24	0.93	1.25	5	0.94	3.76
136	BNN PROVINSI RIAU	16.19	3	13	19.37	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	5	1.88	3.76
137	BNN KABUPATEN KARANGASEM	16.19	3	18	14.37	1.88	0.93	0.62	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
138	BNN KOTA BENGKULU	16.19	3	18	14.37	1.88	0.93	0.62	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
139	BNN KOTA BATU	16.09	3	20	12.18	1.88	1.24	0.62	1.24	1.25	1.25	1.88	2.82
140	BNN KABUPATEN PASURUAN	16.03	3	18	14.06	1.88	0.93	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
141	BNN KOTA DUMAI	15.94	3	20	11.88	1.88	0.93	0.31	0.31	2.50	1.25	0.94	3.76
142	BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	15.93	2	18	15.93	3.76	1.24	0.62	1.24	1.25	5	0.94	1.88
143	BNN KABUPATEN SOLOK	15.93	2	22	15.93	1.88	0.93	0.93	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
144	BNN KABUPATEN GAYO LUES	15.93	2	22	15.93	1.88	1.24	0.62	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
145	BNN PROVINSI JAWA BARAT	15.91	3	19	12.81	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	1.88	1.88
146	PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI	15.90	3	19	12.80	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	1.88
147	BNN PROVINSI JAWA TENGAH	15.78	3	20	11.55	3.76	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	0.94
148	BNN KABUPATEN BOALEMO	15.62	2	15	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
149	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	15.62	2	23	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
150	BALAI REHABILITASI BNN BADDOKA	15.61	2	0	15.61	2.82	1.24	1.24	1.24	5.00	1.25	1.88	0.94
151	BNN KABUPATEN KARAWANG	15.56	3	18	13.12	1.88	1.24	0.31	1.24	2.50	1.25	0.94	3.76
152	BNN KABUPATEN	15.44	3	19	11.87	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76

No.	SATKER	NILAI PIBR	Maturitas MR	Nilai Komposite	TOTAL FR	FAKTOR RISIKO							
						Kebijakan Pimpinan	Total Anggaran Tahun 2023	Belanja Modal	Realisasi Anggaran TA. 2022	Pelaksanaan Audit Tahun Sebelumnya	PTL	DUMAS	Pembangunan ZI
						0.94	0.31	0.31	0.31	1.25	1.25	0.94	0.94
						FR 1	FR 2	FR 3	FR 4	FR 5	FR 6	FR 7	FR 8
	GRESIK												
153	BNN PROVINSI BALI	15.43	3	19	11.86	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	0.94
154	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	15.41	3	18	12.81	1.88	1.24	0.31	0.93	2.50	1.25	0.94	3.76
155	BNN KOTA BANDUNG	15.40	3	18	12.80	1.88	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
156	BNN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	15.40	3	18	12.80	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	1.88	0.94
157	BNN KABUPATEN NGANJUK	15.40	3	18	12.80	1.88	1.24	0.93	1.24	2.50	1.25	0.94	2.82
158	BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	15.31	2	19	15.31	1.88	0.93	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
159	BNN KOTA BAU-BAU	15.31	2	23	15.31	1.88	0.93	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
160	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	15.31	2	0	15.31	1.88	0.93	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
161	BNN KOTA PALOPO	15.30	2	25	15.30	1.88	1.24	1.24	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
162	BNN KABUPATEN NUNUKAN	14.99	2	0	14.99	1.88	1.24	0.62	1.24	5.00	1.25	0.94	2.82
163	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	14.99	2	23	14.99	1.88	0.93	1.24	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
164	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	14.99	2	22	14.99	1.88	0.93	1.24	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
165	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	14.78	3	18	11.56	1.88	0.93	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
166	BNN KOTA PRABUMULIH	14.69	2	0	14.69	1.88	1.24	0.31	0.62	3.75	1.25	1.88	3.76
167	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	14.68	2	0	14.68	1.88	0.93	0.93	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
168	BNN KOTA SURAKARTA	14.37	2	0	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
169	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	14.37	2	24	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
170	BNN KOTA BALIKPAPAN	14.37	2	0	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76

No.	SATKER	NILAI PIBR	Maturitas MR	Nilai Komposite	TOTAL FR	FAKTOR RISIKO							
						Kebijakan Pimpinan	Total Anggaran Tahun 2023	Belanja Modal	Realisasi Anggaran TA. 2022	Pelaksanaan Audit Tahun Sebelumnya	PTL	DUMAS	Pembangunan ZI
						0.94	0.31	0.31	0.31	1.25	1.25	0.94	0.94
						FR 1	FR 2	FR 3	FR 4	FR 5	FR 6	FR 7	FR 8
171	BNN KABUPATEN BONE	14.37	1	24	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
172	BNN KOTA SAWAHLUNTO	14.37	2	18	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
173	BNN KOTA PAYAKUMBUH	14.37	2	18	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
174	INSPEKTORAT UTAMA	14.34	4	15	12.81	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	1.88	1.88
175	BNN KOTA DEPOK	14.22	3	15	13.43	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	2.82
176	BNN KOTA BATAM	14.19	3	14	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
177	LOKA REHABILITASI NARKOBA BNN, BATAM KEPULAUAN RIA	14.18	3	14	14.36	3.76	1.24	1.24	1.24	3.75	1.25	0.94	0.94
178	BNN KABUPATEN TUBAN	14.06	2	0	14.06	1.88	0.93	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
179	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	14.06	2	22	14.06	1.88	0.93	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
180	BNN KABUPATEN BOGOR	14.00	3	18	9.99	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	1.88
181	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	13.97	3	12	15.93	1.88	1.24	0.62	1.24	1.25	5	0.94	3.76
182	BNN KABUPATEN WAY KANAN	13.75	2	0	13.75	1.88	0.93	0.31	1.24	2.50	1.25	1.88	3.76
183	BNN KOTA TANGERANG	13.74	2	0	13.74	1.88	1.24	0.62	1.24	3.75	1.25	0.94	2.82
184	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	13.74	2	22	13.74	1.88	1.24	0.62	1.24	3.75	1.25	0.94	2.82
185	BNN PROVINSI GORONTALO	13.44	1	0	13.44	3.76	1.24	0.31	0.93	1.25	1.25	0.94	3.76
186	BALAI REHABILITASI BNN TANAH MERAH	13.43	2	0	13.43	2.82	1.24	1.24	0.31	3.75	1.25	0.94	1.88
187	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	13.19	3	12	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
188	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	13.12	3	10	16.24	1.88	1.24	0.93	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76

No.	SATKER	NILAI PIBR	Maturitas MR	Nilai Komposite	TOTAL FR	FAKTOR RISIKO							
						Kebijakan Pimpinan	Total Anggaran Tahun 2023	Belanja Modal	Realisasi Anggaran TA. 2022	Pelaksanaan Audit Tahun Sebelumnya	PTL	DUMAS	Pembangunan ZI
						0.94	0.31	0.31	0.31	1.25	1.25	0.94	0.94
						FR 1	FR 2	FR 3	FR 4	FR 5	FR 6	FR 7	FR 8
189	BNN KABUPATEN BATANG	13.11	2	22	13.11	1.88	1.24	0.93	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
190	BNN KABUPATEN KARIMUN	13.09	3	14	12.18	1.88	1.24	0.62	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
191	DEPUTI BIDANG REHABILITASI	12.91	3	13	12.81	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	1.88	1.88
192	BNN KOTA KUPANG	12.87	3	12	13.74	1.88	0.93	1.24	1.24	2.50	1.25	0.94	3.76
193	DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJASAMA	12.81	2	0	12.81	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	1.88	1.88
194	BNN KABUPATEN SUMBAWA	12.81	2	0	12.81	1.88	0.93	0.31	1.24	2.50	1.25	0.94	3.76
195	BNN KOTA KEDIRI	12.80	2	0	12.80	1.88	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
196	BNN KABUPATEN BELITUNG	12.80	2	22	12.80	1.88	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
197	BNN KOTA BITUNG	12.53	3	11	14.05	1.88	1.24	1.24	1.24	2.50	1.25	0.94	3.76
198	BNN KOTA YOGYAKARTA	12.49	2	24	12.49	1.88	0.93	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
199	BNN KABUPATEN GIANJAR	12.49	2	0	12.49	1.88	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
200	BNN KABUPATEN KEDIRI	12.49	2	0	12.49	1.88	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
201	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	12.49	2	24	12.49	1.88	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
202	BNN KABUPATEN POSO	12.49	2	23	12.49	1.88	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
203	BNN KOTA SINGKAWANG	12.49	2	0	12.49	1.88	1.24	1.24	0.93	1.25	1.25	0.94	3.76
204	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	12.49	2	0	12.49	1.88	0.93	0.62	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
205	BNN KOTA MATARAM	12.49	2	0	12.49	1.88	0.93	0.62	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
206	BNN KOTA PANGKAL PINANG	12.49	2	0	12.49	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
207	BNN KOTA SURABAYA	12.49	2	0	12.49	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
208	BNN KOTA TANJUNG	12.43	3	13	11.86	1.88	1.24	0.93	1.24	2.50	1.25	0.94	1.88

No.	SATKER	NILAI PIBR	Maturitas MR	Nilai Komposite	TOTAL FR	FAKTOR RISIKO							
						Kebijakan Pimpinan	Total Anggaran Tahun 2023	Belanja Modal	Realisasi Anggaran TA. 2022	Pelaksanaan Audit Tahun Sebelumnya	PTL	DUMAS	Pembangunan ZI
						0.94	0.31	0.31	0.31	1.25	1.25	0.94	0.94
						FR 1	FR 2	FR 3	FR 4	FR 5	FR 6	FR 7	FR 8
	PINANG												
209	BNN KABUPATEN SUKABUMI	12.18	2	22	12.18	1.88	1.24	0.62	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
210	BNN KABUPATEN MALANG	12.18	2	0	12.18	1.88	1.24	0.62	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
211	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	12.18	2	24	12.18	1.88	0.93	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
212	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	12.18	2	0	12.18	1.88	0.93	1.24	0.93	1.25	1.25	0.94	3.76
213	BNN KABUPATEN MOROWALI	12.18	2	0	12.18	1.88	1.24	1.24	0.62	1.25	1.25	0.94	3.76
214	BNN KOTA MANADO	12.06	3	11	13.12	1.88	1.24	0.31	1.24	2.50	1.25	0.94	3.76
215	BNN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	11.94	3	12	11.87	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	1.88
216	BNN KABUPATEN BLITAR	11.87	2	0	11.87	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
217	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	11.87	2	0	11.87	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
218	BNN KOTA LANGSA	11.87	2	0	11.87	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
219	PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	11.86	2	0	11.86	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	0.94
220	BNN KABUPATEN BATU BARA	11.56	2	22	11.56	1.88	0.93	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
221	BNN KOTA METRO	11.25	2	25	11.25	1.88	0.62	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
222	BNN KABUPATEN BADUNG	10.92	2	0	10.92	1.88	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	1.88
223	BNN KABUPATEN GORONTALO	10.53	3	7	14.06	1.88	0.93	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76

C. Matriks Pemetaan Risiko

Dalam penyusunan PKPT Tahun Anggaran 2024 telah memperhatikan kebijakan Inspektur Utama BNN perihal kegiatan pengawasan :

1. Zona merah (binaan)
 - a. Satker mandatory yang masuk kedalam zona merah yaitu Satker Pusat, Satker Eselon II Mandiri, dan BNNP;
 - b. Satker wilayah dengan nilai perhitungan PIBR > 17.
2. Zona kuning (sentuhan) dengan perhitungan nilai Faktor Risiko (FR) > Median nilai FR 14.07 dari skala 25;
3. Zona hijau (pantauan) dengan perhitungan nilai Faktor Risiko (FR) < Median nilai FR 14.06 dari skala 25.

Tabel. 4.2 Matriks Pemetaan Risiko Satuan Kerja di Lingkungan BNN

No	Satker	Status Akhir	Nilai PIBR	Nilai FR	Kebijakan Pimpinan	Total Anggaran	Belanja Modal	Realisasi Anggaran TA. 2022	Pelaksanaan Audit Tahun Sebelumnya	PTL	DUMAS	Pembangunan ZI
1	DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN	Binaan	19.31	15.62	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	3.76	1.88
2	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BNN	Binaan	19.19	14.37	3.76	1.24	1.24	0.93	1.25	1.25	0.94	3.76
3	BALAI BESAR REHABILITASI	Binaan	19.15	12.49	3.76	1.24	1.24	0.93	1.25	1.25	1.88	0.94

	BNN											
4	DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Binaan	17.44	11.87	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	1.88
5	SEKRETARIAT UTAMA	Binaan	17.37	13.74	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	1.88	1.88
6	DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN	Binaan	16.94	11.87	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	1.88
7	PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI	Binaan	15.90	12.80	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	1.88
8	INSPEKTORAT UTAMA	Binaan	14.34	12.81	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	1.88	1.88
9	DEPUTI BIDANG REHABILITASI	Binaan	12.91	12.81	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	1.88	1.88
10	DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJASAMA	Binaan	12.81	12.81	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	1.88	1.88
11	PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	Binaan	11.86	11.86	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	0.94
12	BNN PROVINSI DKI JAKARTA	Binaan	21.32	20.63	3.76	1.24	1.24	0.62	1.25	5	3.76	3.76

13	BNN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Binaan	20.22	18.44	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	5	1.88	3.76
14	BNN PROVINSI MALUKU	Binaan	20.22	18.43	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	5	0.94	3.76
15	BNN PROVINSI MALUKU UTARA	Binaan	19.38	13.75	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
16	BNN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Binaan	19.38	13.75	3.76	1.24	0.62	0.93	1.25	1.25	0.94	3.76
17	BNN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Binaan	19.34	14.68	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	1.88	2.82
18	BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Binaan	19.19	14.38	3.76	1.24	0.31	0.62	1.25	2.5	0.94	3.76
19	BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Binaan	18.40	12.80	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	1.88
20	BNN PROVINSI PAPUA	Binaan	18.38	13.75	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
21	BNN PROVINSI SULAWESI UTARA	Binaan	18.35	14.69	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	1.88	3.76
22	BNN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Binaan	18.34	14.68	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	2.82	1.88
23	BNN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Binaan	18.34	14.68	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
24	BNN PROVINSI JAWA TIMUR	Binaan	18.25	12.49	3.76	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	1.88	0.94
25	BNN PROVINSI SUMATERA BARAT	Binaan	17.91	12.81	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	2.82
26	BNN PROVINSI JAMBI	Binaan	17.88	13.75	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76

27	BNN PROVINSI PAPUA BARAT	Binaan	17.88	13.75	3.76	1.24	0.62	0.93	1.25	1.25	0.94	3.76
28	BNN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Binaan	17.87	13.74	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	2.82
29	BNN PROVINSI SULAWESI BARAT	Binaan	17.87	13.74	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	2.82
30	BNN PROVINSI BANTEN	Binaan	17.87	13.74	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	1.88	1.88
31	BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Binaan	17.87	13.74	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	1.88	1.88
32	BNN PROVINSI SUMATERA UTARA	Binaan	17.75	12.49	3.76	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	1.88
33	BNN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Binaan	17.41	12.81	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	1.88	1.88
34	BNN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Binaan	17.40	12.80	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	1.88	0.94
35	BNN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Binaan	17.40	12.80	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	1.88
36	BNN PROVINSI BENGKULU	Binaan	17.31	15.62	3.76	1.24	0.93	1.24	1.25	2.5	1.88	2.82
37	BNN PROVINSI LAMPUNG	Binaan	16.56	16.56	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	2.82	3.76
38	BNN PROVINSI RIAU	Binaan	16.19	19.37	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	5	1.88	3.76
39	BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Binaan	15.93	15.93	3.76	1.24	0.62	1.24	1.25	5	0.94	1.88
40	BNN PROVINSI JAWA BARAT	Binaan	15.91	12.81	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	1.88	1.88

41	BNN PROVINSI JAWA TENGAH	Binaan	15.78	11.55	3.76	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	0.94
42	BNN PROVINSI BALI	Binaan	15.43	11.86	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	0.94
43	BNN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Binaan	15.40	12.80	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	1.88	0.94
44	BNN PROVINSI GORONTALO	Binaan	13.44	13.44	3.76	1.24	0.31	0.93	1.25	1.25	0.94	3.76
45	BNN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Binaan	11.94	11.87	3.76	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	1.88
46	BNN KABUPATEN DONGGALA	Binaan	21.03	19.05	1.88	1.24	1.24	1.24	3.75	5	0.94	3.76
47	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	Binaan	21.00	19.99	1.88	1.24	0.93	1.24	5.00	5	0.94	3.76
48	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	Binaan	20.97	20.93	1.88	1.24	0.93	1.24	5.00	5	1.88	3.76
49	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	Binaan	20.90	17.80	1.88	1.24	1.24	1.24	3.75	3.75	0.94	3.76
50	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	Binaan	20.69	19.37	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	5	0.94	3.76
51	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	Binaan	20.31	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
52	BNN KABUPATEN SUMENEP	Binaan	19.78	16.56	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	5	1.88	3.76
53	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	Binaan	19.78	16.55	1.88	1.24	1.24	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
54	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	Binaan	19.78	16.55	1.88	1.24	1.24	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
55	BNN KABUPATEN BANYUMAS	Binaan	19.69	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	1.88	2.82

56	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	Binaan	19.62	16.24	1.88	0.93	1.24	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
57	BNN KABUPATEN BIMA	Binaan	19.37	19.37	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	5	0.94	3.76
58	BNN KOTA PALU	Binaan	19.37	19.37	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	5	0.94	3.76
59	BNN KOTA PONTIANAK	Binaan	19.34	14.67	1.88	1.24	1.24	1.24	5.00	1.25	0.94	1.88
60	BNN KOTA BONTANG	Binaan	19.31	15.62	1.88	0.93	0.62	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
61	BNN KABUPATEN JAYAPURA	Binaan	19.31	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
62	BNN KABUPATEN MIMIKA	Binaan	19.31	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
63	BNN KABUPATEN KARO	Binaan	19.28	16.55	1.88	1.24	1.24	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
64	BNN KOTA BANJARMASIN	Binaan	19.19	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
65	BNN KABUPATEN TABALONG	Binaan	19.16	15.31	1.88	0.93	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
66	BNN KABUPATEN LUMAJANG	Binaan	19.15	17.18	1.88	1.24	0.93	0.93	2.50	5	1.88	2.82
67	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	Binaan	19.12	16.24	1.88	1.24	0.93	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
68	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	Binaan	19.12	16.24	1.88	1.24	0.93	1.24	1.25	5	0.94	3.76
69	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	Binaan	19.12	16.24	1.88	1.24	0.93	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
70	BNN KABUPATEN PELALAWAN	Binaan	19.06	13.12	1.88	1.24	0.31	0.93	3.75	1.25	0.94	2.82
71	BNN KABUPATEN KUNINGAN	Binaan	19.00	14.99	1.88	1.24	0.62	1.24	5.00	1.25	0.94	2.82
72	BNN KOTA TEGAL	Binaan	18.81	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76

73	BNN KABUPATEN SINTANG	Binaan	18.81	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
74	BNN KABUPATEN SANGGAU	Binaan	18.81	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
75	BNN KABUPATEN BIREUEN	Binaan	18.81	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
76	BNN KOTA SABANG	Binaan	18.81	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
77	BNN KABUPATEN PIDIE	Binaan	18.81	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
78	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	Binaan	18.75	12.49	1.88	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
79	BNN KOTA MALANG	Binaan	18.75	12.49	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
80	BNN KABUPATEN KENDAL	Binaan	18.72	13.43	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	2.82
81	BNN KABUPATEN BULELENG	Binaan	18.56	13.12	1.88	1.24	0.62	1.24	1.25	1.25	1.88	3.76
82	BNN KABUPATEN CILACAP	Binaan	18.56	13.11	1.88	1.24	0.93	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
83	BNN KOTA SAMARINDA	Binaan	18.53	14.05	1.88	1.24	0.93	1.24	3.75	1.25	0.94	2.82
84	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	Binaan	18.50	15.00	1.88	0.93	0.31	1.24	3.75	1.25	1.88	3.76
85	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	Binaan	18.50	15.00	1.88	0.93	0.31	1.24	3.75	1.25	1.88	3.76
86	BNN KOTA TANJUNG BALAI	Binaan	18.40	12.80	1.88	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
87	BNN KOTA PAGARALAM	Binaan	18.34	14.68	1.88	1.24	0.93	0.93	3.75	1.25	0.94	3.76
88	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	Binaan	18.19	14.37	1.88	0.93	0.62	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
89	BNN KABUPATEN KOLAKA	Binaan	18.19	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
90	BNN KABUPATEN CIANJUR	Binaan	18.03	14.05	1.88	1.24	0.93	1.24	3.75	1.25	0.94	2.82

91	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	Binaan	18.00	15.00	1.88	0.93	0.31	0.93	5.00	1.25	0.94	3.76
92	BNN KABUPATEN BALANGAN	Binaan	17.94	11.87	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
93	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	Binaan	17.90	12.80	1.88	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
94	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	Binaan	17.87	13.74	1.88	1.24	0.93	1.24	2.50	1.25	0.94	3.76
95	BNN KOTA PALANGKARAYA	Binaan	17.87	13.74	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	1.88
96	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	Binaan	17.78	11.56	1.88	0.93	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
97	LOKA REHABILITASI NARKOBA BNN, KALIANDA LAMPUNG	Binaan	18.81	15.61	3.76	1.24	1.24	1.24	5.00	1.25	0.94	0.94
98	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	Sentuhan	17.72	13.44	1.88	0.93	0.31	1.24	1.25	1.25	2.82	3.76
99	BNN KOTA CILEGON	Sentuhan	17.72	13.43	1.88	1.24	0.62	1.24	2.50	1.25	0.94	3.76
100	BNN KABUPATEN GARUT	Sentuhan	17.72	13.43	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	2.82
101	BNN KOTA MOJOKERTO	Sentuhan	17.59	12.18	1.88	1.24	0.62	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
102	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	Sentuhan	17.56	13.12	1.88	1.24	0.62	1.24	1.25	1.25	1.88	3.76
103	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	Sentuhan	17.56	13.12	1.88	1.24	0.62	1.24	1.25	1.25	1.88	3.76
104	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	Sentuhan	17.56	13.12	1.88	1.24	0.31	1.24	2.50	1.25	0.94	3.76

105	BNN KABUPATEN BANTUL	Sentuhan	17.56	13.11	1.88	0.93	1.24	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
106	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	Sentuhan	17.56	13.11	1.88	1.24	0.93	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
107	BNN KOTA TASIKMALAYA	Sentuhan	17.50	15.00	1.88	0.93	0.31	1.24	3.75	1.25	1.88	3.76
108	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	Sentuhan	17.49	17.49	1.88	0.93	1.24	1.24	5.00	2.5	0.94	3.76
109	BNN KOTA GORONTALO	Sentuhan	17.49	17.49	1.88	1.24	1.24	0.93	2.50	5	0.94	3.76
110	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	Sentuhan	17.44	11.87	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
111	BNN KOTA JAKARTA UTARA	Sentuhan	17.40	12.80	1.88	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
112	BNN KABUPATEN MAGELANG	Sentuhan	17.40	12.80	1.88	0.93	0.93	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
113	BNN KABUPATEN BATANGHARI	Sentuhan	17.28	11.56	1.88	1.24	0.31	0.93	1.25	1.25	0.94	3.76
114	BNN KOTA KENDARI	Sentuhan	17.28	16.55	1.88	1.24	1.24	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
115	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	Sentuhan	17.25	12.50	1.88	0.93	0.31	1.24	1.25	1.25	1.88	3.76
116	BNN KOTA DENPASAR	Sentuhan	17.25	12.49	1.88	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
117	BNN KOTA CIREBON	Sentuhan	17.25	12.49	1.88	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
118	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	Sentuhan	17.25	12.49	1.88	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
119	BNN KOTA BANJARBARU	Sentuhan	17.25	12.49	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
120	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	Sentuhan	17.25	12.49	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
121	BNN KABUPATEN BELU	Sentuhan	17.22	18.43	1.88	1.24	1.24	1.24	5.00	1.25	2.82	3.76

122	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	Sentuhan	17.09	12.18	1.88	0.93	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
123	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	Sentuhan	16.94	11.87	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
124	BNN KOTA CIMAHI	Sentuhan	16.94	11.87	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
125	BNN KABUPATEN SUMEDANG	Sentuhan	16.94	11.87	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
126	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	Sentuhan	16.94	11.87	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
127	BNN KABUPATEN SIDOARJO	Sentuhan	16.93	11.86	1.88	1.24	0.62	1.24	3.75	1.25	0.94	0.94
128	BNN KOTA JAMBI	Sentuhan	16.88	13.75	1.88	0.93	0.31	0.93	3.75	1.25	0.94	3.76
129	BNN KOTA PEKANBARU	Sentuhan	16.87	13.74	1.88	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	1.88	3.76
130	BNN KOTA BANDA ACEH	Sentuhan	16.78	11.56	1.88	0.93	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
131	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	Sentuhan	16.78	11.56	1.88	0.93	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
132	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	Sentuhan	16.78	11.56	1.88	1.24	0.31	0.93	1.25	1.25	0.94	3.76
133	BNN KABUPATEN BANGKA	Sentuhan	16.78	11.56	1.88	1.24	0.31	0.93	1.25	1.25	0.94	3.76
134	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	Sentuhan	16.75	12.49	1.88	0.93	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
135	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	Sentuhan	16.75	12.49	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
136	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	Sentuhan	16.62	11.24	1.88	1.24	0.62	1.24	1.25	1.25	0.94	2.82
137	BNN KABUPATEN CIAMIS	Sentuhan	16.47	10.93	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	2.82

138	BNN KOTA BINJAI	Sentuhan	16.34	14.68	1.88	1.24	0.62	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
139	BNN KABUPATEN LANGKAT	Sentuhan	16.25	12.49	1.88	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
140	BNN KABUPATEN SLEMAN	Sentuhan	16.25	12.49	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
141	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	Sentuhan	16.24	16.24	1.88	1.24	1.24	1.24	3.75	1.25	1.88	3.76
142	BNN KOTA TARAKAN	Sentuhan	16.24	16.24	1.88	1.24	0.93	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
143	BNN KABUPATEN MUNA	Sentuhan	16.24	16.24	1.88	1.24	0.93	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
144	BNN KOTA TEBING TINGGI	Sentuhan	16.24	16.24	1.88	1.24	0.93	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
145	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	Sentuhan	16.24	16.24	1.88	1.24	0.93	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
146	BNN KABUPATEN ASAHAN	Sentuhan	16.24	16.24	1.88	1.24	0.93	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
147	BNN KOTA TUAL	Sentuhan	16.24	16.24	1.88	1.24	1.24	0.93	1.25	5	0.94	3.76
148	BNN KABUPATEN KARANGASEM	Sentuhan	16.19	14.37	1.88	0.93	0.62	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
149	BNN KOTA BENGKULU	Sentuhan	16.19	14.37	1.88	0.93	0.62	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
150	BNN KOTA BATU	Sentuhan	16.09	12.18	1.88	1.24	0.62	1.24	1.25	1.25	1.88	2.82
151	BNN KABUPATEN PASURUAN	Sentuhan	16.03	14.06	1.88	0.93	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
152	BNN KOTA DUMAI	Sentuhan	15.94	11.88	1.88	0.93	0.31	0.31	2.50	1.25	0.94	3.76
153	BNN KABUPATEN SOLOK	Sentuhan	15.93	15.93	1.88	0.93	0.93	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
154	BNN KABUPATEN GAYO LUES	Sentuhan	15.93	15.93	1.88	1.24	0.62	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
155	BNN KABUPATEN BOALEMO	Sentuhan	15.62	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76

156	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	Sentuhan	15.62	15.62	1.88	1.24	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
157	BNN KABUPATEN KARAWANG	Sentuhan	15.56	13.12	1.88	1.24	0.31	1.24	2.50	1.25	0.94	3.76
158	BNN KABUPATEN GRESIK	Sentuhan	15.44	11.87	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
159	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	Sentuhan	15.41	12.81	1.88	1.24	0.31	0.93	2.50	1.25	0.94	3.76
160	BNN KOTA BANDUNG	Sentuhan	15.40	12.80	1.88	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
161	BNN KABUPATEN NGANJUK	Sentuhan	15.40	12.80	1.88	1.24	0.93	1.24	2.50	1.25	0.94	2.82
162	BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	Sentuhan	15.31	15.31	1.88	0.93	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
163	BNN KOTA BAU-BAU	Sentuhan	15.31	15.31	1.88	0.93	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
164	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	Sentuhan	15.31	15.31	1.88	0.93	0.31	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
165	BNN KOTA PALOPO	Sentuhan	15.30	15.30	1.88	1.24	1.24	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
166	BNN KABUPATEN NUNUKAN	Sentuhan	14.99	14.99	1.88	1.24	0.62	1.24	5.00	1.25	0.94	2.82
167	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	Sentuhan	14.99	14.99	1.88	0.93	1.24	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
168	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	Sentuhan	14.99	14.99	1.88	0.93	1.24	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
169	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	Sentuhan	14.78	11.56	1.88	0.93	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
170	BNN KOTA PRABUMULIH	Sentuhan	14.69	14.69	1.88	1.24	0.31	0.62	3.75	1.25	1.88	3.76
171	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	Sentuhan	14.68	14.68	1.88	0.93	0.93	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76

172	BNN KOTA SURAKARTA	Sentuhan	14.37	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
173	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	Sentuhan	14.37	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
174	BNN KOTA BALIKPAPAN	Sentuhan	14.37	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
175	BNN KABUPATEN BONE	Sentuhan	14.37	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
176	BNN KOTA SAWAHLUNTO	Sentuhan	14.37	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
177	BNN KOTA PAYAKUMBUH	Sentuhan	14.37	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
178	BNN KOTA DEPOK	Sentuhan	14.22	13.43	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	2.82
179	BNN KOTA BATAM	Sentuhan	14.19	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
180	LOKA REHABILITASI BNN, DELI SERDANG SUMATERA UTARA	Sentuhan	16.43	11.86	3.76	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	0.94
181	BALAI REHABILITASI BNN BADDOKA	Sentuhan	15.61	15.61	2.82	1.24	1.24	1.24	5.00	1.25	1.88	0.94
182	LOKA REHABILITASI NARKOBA BNN, BATAM KEPULAUAN RIAU	Sentuhan	14.18	14.36	3.76	1.24	1.24	1.24	3.75	1.25	0.94	0.94
183	BNN KABUPATEN TUBAN	Pantauan	14.06	14.06	1.88	0.93	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
184	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	Pantauan	14.06	14.06	1.88	0.93	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
185	BNN KABUPATEN BOGOR	Pantauan	14.00	9.99	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	1.88

186	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Pantauan	13.97	15.93	1.88	1.24	0.62	1.24	1.25	5	0.94	3.76
187	BNN KABUPATEN WAY KANAN	Pantauan	13.75	13.75	1.88	0.93	0.31	1.24	2.50	1.25	1.88	3.76
188	BNN KOTA TANGERANG	Pantauan	13.74	13.74	1.88	1.24	0.62	1.24	3.75	1.25	0.94	2.82
189	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	Pantauan	13.74	13.74	1.88	1.24	0.62	1.24	3.75	1.25	0.94	2.82
190	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	Pantauan	13.19	14.37	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
191	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	Pantauan	13.12	16.24	1.88	1.24	0.93	1.24	5.00	1.25	0.94	3.76
192	BNN KABUPATEN BATANG	Pantauan	13.11	13.11	1.88	1.24	0.93	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
193	BNN KABUPATEN KARIMUN	Pantauan	13.09	12.18	1.88	1.24	0.62	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
194	BNN KOTA KUPANG	Pantauan	12.87	13.74	1.88	0.93	1.24	1.24	2.50	1.25	0.94	3.76
195	BNN KABUPATEN SUMBAWA	Pantauan	12.81	12.81	1.88	0.93	0.31	1.24	2.50	1.25	0.94	3.76
196	BNN KOTA KEDIRI	Pantauan	12.80	12.80	1.88	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
197	BNN KABUPATEN BELITUNG	Pantauan	12.80	12.80	1.88	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
198	BNN KOTA BITUNG	Pantauan	12.53	14.05	1.88	1.24	1.24	1.24	2.50	1.25	0.94	3.76
199	BNN KOTA YOGYAKARTA	Pantauan	12.49	12.49	1.88	0.93	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
200	BNN KABUPATEN GIANJAR	Pantauan	12.49	12.49	1.88	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
201	BNN KABUPATEN KEDIRI	Pantauan	12.49	12.49	1.88	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
202	BNN KABUPATEN	Pantauan	12.49	12.49	1.88	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76

	TANGGAMUS											
203	BNN KABUPATEN POSO	Pantauan	12.49	12.49	1.88	1.24	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
204	BNN KOTA SINGKAWANG	Pantauan	12.49	12.49	1.88	1.24	1.24	0.93	1.25	1.25	0.94	3.76
205	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	Pantauan	12.49	12.49	1.88	0.93	0.62	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
206	BNN KOTA MATARAM	Pantauan	12.49	12.49	1.88	0.93	0.62	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
207	BNN KOTA PANGKAL PINANG	Pantauan	12.49	12.49	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
208	BNN KOTA SURABAYA	Pantauan	12.49	12.49	1.88	1.24	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	1.88
209	BNN KOTA TANJUNG PINANG	Pantauan	12.43	11.86	1.88	1.24	0.93	1.24	2.50	1.25	0.94	1.88
210	BNN KABUPATEN SUKABUMI	Pantauan	12.18	12.18	1.88	1.24	0.62	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
211	BNN KABUPATEN MALANG	Pantauan	12.18	12.18	1.88	1.24	0.62	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
212	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	Pantauan	12.18	12.18	1.88	0.93	0.93	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
213	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	Pantauan	12.18	12.18	1.88	0.93	1.24	0.93	1.25	1.25	0.94	3.76
214	BNN KABUPATEN MOROWALI	Pantauan	12.18	12.18	1.88	1.24	1.24	0.62	1.25	1.25	0.94	3.76
215	BNN KOTA MANADO	Pantauan	12.06	13.12	1.88	1.24	0.31	1.24	2.50	1.25	0.94	3.76
216	BNN KABUPATEN BLITAR	Pantauan	11.87	11.87	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
217	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	Pantauan	11.87	11.87	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
218	BNN KOTA LANGSA	Pantauan	11.87	11.87	1.88	1.24	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
219	BNN KABUPATEN BATU BARA	Pantauan	11.56	11.56	1.88	0.93	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76

220	BNN KOTA METRO	Pantauan	11.25	11.25	1.88	0.62	0.31	1.24	1.25	1.25	0.94	3.76
221	BNN KABUPATEN BADUNG	Pantauan	10.92	10.92	1.88	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	0.94	1.88
222	BNN KABUPATEN GORONTALO	Pantauan	10.53	14.06	1.88	0.93	0.31	1.24	3.75	1.25	0.94	3.76
223	BALAI REHABILITASI BNN TANAH MERAH	Pantauan	13.43	13.43	2.82	1.24	1.24	0.31	3.75	1.25	0.94	1.88

D. Hasil Pemetaan Risiko Berupa Zonafikasi

1. Zonafikasi untuk Inspektorat I

Tabel 4.4 Zonafikasi Satuan Kerja Inspektorat I Untuk Tahun 2024

NO	SATKER	NO	SATKER	NO	SATKER	NO	SATKER	NO	SATKER
1	DEPUTI PEMBERANTASAN	16	BNN KABUPATEN PIDIE	31	BNN KOTA PALANGKARAYA	46	BNN KOTA CIREBON	61	BNN KOTA BENGKULU
2	DEPUTI REHABILITASI	17	BNN KABUPATEN MIMIKA	32	BNN KABUPATEN PELALAWAN	47	BNN KOTA CIMAHI	62	BNN KOTA KUPANG
3	BALAI BESAR REHABILITASI	18	BNN KABUPATEN BALANGAN	33	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	48	BNN KABUPATEN SUMEDANG	63	BALAI REHABILITASI BNN TANAH MERAH
4	LOKA REHABILITASI BNN KALIANDA	19	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	34	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	49	BNN KABUPATEN CIAMIS	64	BNN KABUPATEN BOGOR
5	BNN PROVINSI LAMPUNG	20	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	35	BNN KOTA BATAM	50	BNN KABUPATEN KARAWANG	65	BNN KABUPATEN SUKABUMI
6	BNN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	21	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	36	LOKA REHABILITASI NARKOBA BNN, BATAM KEPULAUAN RIA	51	BNN KOTA BANDUNG	66	BNN KABUPATEN BATANG
7	BNN PROVINSI RIAU	22	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	37	BNN KOTA PEKANBARU	52	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	67	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

8	BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	23	BNN KOTA SAMARINDA	38	BNN KOTA DUMAI	53	BNN KOTA DEPOK	68	BNN KABUPATEN KARIMUN
9	BNN PROVINSI JAWA TENGAH	24	BNN KOTA BONTANG	39	BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	54	BNN KOTA BALIKPAPAN	69	BNN KOTA TANJUNG PINANG
10	BNN PROVINSI JAWA BARAT	25	BNN KABUPATEN KUNINGAN	40	BNN KABUPATEN MAGELANG	55	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	70	BNN KABUPATEN WAY KANAN
11	BNN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	26	BNN KABUPATEN CIANJUR	41	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	56	BALAI REHABILITASI BNN BADDOKA	71	BNN KABUPATEN TANGGAMUS
12	BNN PROVINSI SULAWESI SELATAN	27	BNN KABUPATEN BANYUMAS	42	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	57	BNN KOTA PALOPO	72	BNN KOTA METRO
13	BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	28	BNN KOTA TEGAL	43	BNN KOTA SURAKARTA	58	BNN KABUPATEN BONE		
14	BNN PROVINSI BENGKULU	29	BNN KABUPATEN KENDAL	44	BNN KABUPATEN GARUT	59	BNN KABUPATEN ROTE NDAO		
15	BNN PROVINSI MALUKU UTARA	30	BNN KABUPATEN CILACAP	45	BNN KOTA TASIKMALAYA	60	BNN KABUPATEN BELU		

2. Zonafikasi untuk Inspektorat II

Tabel 4.5 Zonafikasi Satuan Kerja Inspektorat II Untuk Tahun 2024

NO	SATKER	NO	SATKER	NO	SATKER	NO	SATKER
1	Sekretaris Utama BNN	16	BNN KABUPATEN SANGGAU	31	BNN KABUPATEN JAYAPURA	46	BNN KABUPATEN MUNA
2	Inspektorat Utama BNN	17	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	32	BNN PROVINSI PAPUA BARAT	47	BNN KOTA BAU-BAU
3	Pusat Pengembangan Sumaber Daya Manusia (PPSDM)	18	BNN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	33	BNN KABUPATEN SOLOK	48	BNN KOTA TUAL
4	BNN PROVINSI SUMATERA BARAT	19	BNN KOTA BANJARMASIN	34	BNN KOTA SAWAHLUNTO	49	BNN KABUPATEN BELITUNG
5	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	20	BNN KABUPATEN TABALONG	35	BNN KOTA PAYAKUMBUH	50	BNN KOTA PANGKAL PINANG
6	BNN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	21	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	36	BNN KABUPATEN BANGKA	51	BNN KOTA TANGERANG
7	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	22	BNN PROVINSI SULAWESI TENGAH	37	BNN KOTA CILEGON	52	BNN KOTA YOGYAKARTA
8	BNN PROVINSI BANTEN	23	BNN KOTA PALU	38	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	53	BNN KABUPATEN SUMBAWA
9	BNN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	24	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	39	BNN KABUPATEN BANTUL	54	BNN KOTA MATARAM
10	BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	25	BNNK DONGGALA	40	BNN KABUPATEN SLEMAN	55	BNN KOTA SINGKAWANG
11	BNN KABUPATEN BIMA	26	BNN PROVINSI	41	BNN KABUPATEN	56	BNN KABUPATEN TANAH

			SULAWESI TENGGERA		SUMBAWA BARAT		LAUT
12	BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	27	BNN KABUPATEN KOLAKA	42	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	57	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
13	BNN KOTA PONTIANAK	28	BNN PROVINSI MALUKU	43	BNN KOTA BANJARBARU	58	BNN KABUPATEN BARITO KUALA
14	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	29	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	44	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	59	BNN KABUPATEN POSO
15	BNN KABUPATEN SINTANG	30	BNNP PAPUA	45	BNN KOTA KENDARI	60	BNN KABUPATEN MOROWALI

3. Zonafikasi untuk Inspektorat III

Tabel 4.6 Zonafikasi Satuan Kerja Inspektorat I Untuk Tahun 2024

NO	SATKER	NO	SATKER	NO	SATKER	NO	SATKER	NO	SATKER	NO	SATKER	NO	SATKER
1	DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	16	BNN KABUPATEN BIREUEN	31	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	46	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	61	BNN KABUPATEN KARANGASEM	76	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	91	BNN KABUPATEN BADUNG
2	DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN	17	BNN KOTA SABANG	32	BNN PROVINSI SUMATERA UTARA	47	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	62	BNN KOTA BATU	77	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	92	BNN KABUPATEN GORONTALO
3	PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI	18	BNN KABUPATEN PIDIE	33	BNN PROVINSI BALI	48	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	63	BNN KABUPATEN PASURUAN	78	BNN KOTA LUBUKLINGGAU		
4	DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJASAMA	19	BNN KOTA MALANG	34	BNN PROVINSI GORONTALO	49	BNN KABUPATEN SIDOARJO	64	BNN KABUPATEN GAYO LUES	79	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR		

5	PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	20	BNN KABUPATEN BULELENG	35	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	50	BNN KOTA JAMBI	65	BNN KABUPATEN BOALEMO	80	BNN KOTA KEDIRI
6	BNN PROVINSI DKI JAKARTA	21	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	36	BNN KOTA MOJOKERTO	51	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	66	BNN KABUPATEN GRESIK	81	BNN KOTA BITUNG
7	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	22	BNN KOTA TANJUNG BALAI	37	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	52	BNN KOTA BANDA ACEH	67	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	82	BNN KABUPATEN GIANJAR
8	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	23	BNN PROVINSI SULAWESI UTARA	38	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	53	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	68	BNN KABUPATEN NGANJUK	83	BNN KABUPATEN KEDIRI
9	BNN KABUPATEN SUMENEP	24	BNN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	39	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	54	LOKA REHABILITASI BNN, DELI SERDANG SUMATERA UTARA	69	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	84	BNN KOTA SURABAYA
10	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	25	BNN PROVINSI SUMATERA SELATAN	40	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	55	BNN KOTA BINJAI	70	BNN KABUPATEN NUNUKAN	85	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG
11	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	26	BNN KOTA PAGARALAM	41	BNN KOTA GORONTALO	56	BNN KABUPATEN LANGKAT	71	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	86	BNN KABUPATEN MALANG
12	BNN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	27	BNN PROVINSI JAWA TIMUR	42	BNN KOTA JAKARTA UTARA	57	BNN KOTA TARAKAN	72	BNN KOTA PRABUMULIH	87	BNN KOTA MANADO
13	BNN KABUPATEN KARO	28	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	43	BNN KABUPATEN BATANGHARI	58	BNN KOTA TEBING TINGGI	73	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	88	BNN KABUPATEN BLITAR
14	BNN KABUPATEN LUMAJANG	29	BNN PROVINSI JAMBI	44	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	59	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	74	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	89	BNN KOTA LANGSA
15	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	30	BNN PROVINSI SULAWESI BARAT	45	BNN KOTA DENPASAR	60	BNN KABUPATEN ASAHAN	75	BNN KABUPATEN TUBAN	90	BNN KABUPATEN BATU BARA

BAB V

PENUTUP

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional tahun 2024 diharapkan agar kegiatan pengawasan internal dapat dilaksanakan secara terstruktur, terukur, dan terintegrasi dengan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Program (IKP) serta memenuhi kaidah tertib administrasi.

Jakarta, Oktober 2023

**a.n. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
INSPEKTUR UTAMA**



Drs. WAHYONO, M.H., CFrA., CGCAE.

**FAKTOR DAN SKALA RISIKO
AUDIT TAHUN 2024**

No.	Faktor Risiko	Bobot	Kriteria	Level Skor	Level Risiko
1	Kebijakan Pimpinan	15%	Satker Pusat / BNNP	4	Risiko Sangat Tinggi
			Balai	3	Risiko Tinggi
			BNNK/ Loka	2	Risiko Rendah
			-	1	Risiko Sangat Rendah
2	Total Anggaran	5%	> 1,8 M	4	Risiko Sangat Tinggi
			> 1,5 s.d 1,8 M	3	Risiko Tinggi
			>1,2 s.d 1,5 M	2	Risiko Rendah
			≤ 1,2 M	1	Risiko Sangat Rendah
3	Belanja Modal	5%	> 50 jt	4	Risiko Sangat Tinggi
			> 25 - 50 jt	3	Risiko Tinggi
			>0 - 25 jt	2	Risiko Rendah
			-	1	Risiko Sangat Rendah
4	Realisasi Anggaran Tahun Sebelumnya (semakin tinggi realisasi semakin beresiko)	5%	>97-100%	4	Risiko Sangat Tinggi
			>95-97%	3	Risiko Tinggi
			>92-95%	2	Risiko Rendah
			≤92%	1	Risiko Sangat Rendah
5	Pelaksanaan Audit Tahun Sebelumnya (Ren, Ops, Kinerja, PNBP)	20%	> 2 Tahun	4	Risiko Sangat Tinggi
			2 Tahun	3	Risiko Tinggi
			1 Tahun	2	Risiko Rendah
			Kurang dari 12 Bulan	1	Risiko Sangat Rendah
6	Waktu Penyelesaian Rekomendasi LHA Jumlah Temuan Eksternal dan Internal	20%	> 3 Tahun	4	Risiko Sangat Tinggi
			2 s.d. 3 Tahun	3	Risiko Tinggi
			1 s.d. 2 Tahun	2	Risiko Rendah
			0 s.d. 1 Tahun	1	Risiko Sangat Rendah
7	Jumlah Pengaduan Masyarakat dan WBS	15%	> 2	4	Risiko Sangat Tinggi
			2 Pengaduan	3	Risiko Tinggi
			1 Pengaduan	2	Risiko Rendah
			Tidak Ada Pengaduan	1	Risiko Sangat Rendah
8	Pembangunan Zona Integritas	15%	Belum membangun	4	Risiko Sangat Tinggi
			Usulan Satker ZI dari para IR ke Tim TPI	3	Risiko Tinggi
			Telah diajukan ke TPN	2	Risiko Rendah
			Mendapatkan Predikat WBK atau WBBM	1	Risiko Sangat Rendah
		100.00%			

NO	SATKER	STATUS AKHIR 2024	INSPEKTORAT	NILAI PIBR	Maturitas MR	Nilai Komposi te	NILAI PIBR	TOTAL FR	Kebijakan Pimpinan		Total Anggaran Tahun 2023		Belanja Modal		Realisasi Anggaran TA. 2022		Pelaksanaan Audit Tahun Sebelumnya		PTL		DUMAS		PEMBANGUNAN ZI	
									0.94		0.31		0.31		0.31		1.25		1.25		0.94		0.94	
									Level Skor	FR 1	Level Risiko	FR 2	Level Risiko	FR 3	Level Risiko	FR 4	Level Risiko	FR 5	Level Risiko	FR 6	Level Risiko	FR 7	Level Risiko	FR 8
1	BNN PROVINSI DKI JAKARTA	BINAAN	INSPEKTORAT III	21.32	3	22	21.32	20.63	4	3.76	4	1.24	4	1.24	2	0.62	1	1.25	4	5	4	3.76	4	3.76
2	BNN KABUPATEN DONGGALA	BINAAN	INSPEKTORAT II	21.03	3	23	21.03	19.05	2	1.88	4	1.24	4	1.24	4	1.24	3	3.75	4	5	1	0.94	4	3.76
3	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	BINAAN	INSPEKTORAT II	21.00	3	22	21.00	19.99	2	1.88	4	1.24	3	0.93	4	1.24	4	5.00	4	5	1	0.94	4	3.76
4	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	BINAAN	INSPEKTORAT I	20.97	3	21	20.97	20.93	2	1.88	4	1.24	3	0.93	4	1.24	4	5.00	4	5	2	1.88	4	3.76
5	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	BINAAN	INSPEKTORAT I	20.90	3	24	20.90	17.80	2	1.88	4	1.24	4	1.24	4	1.24	3	3.75	3	3.75	1	0.94	4	3.76
6	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	BINAAN	INSPEKTORAT III	20.69	3	22	20.69	19.37	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	4	5.00	4	5	1	0.94	4	3.76
7	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	BINAAN	INSPEKTORAT III	20.31	3	25	20.31	15.62	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	4	5.00	1	1.25	1	0.94	4	3.76
8	BNN PROVINSI SULAWESI TENGAH	BINAAN	INSPEKTORAT II	20.22	3	22	20.22	18.44	4	3.76	4	1.24	1	0.31	4	1.24	1	1.25	4	5	2	1.88	4	3.76
9	BNN PROVINSI MALUKU	BINAAN	INSPEKTORAT II	20.22	3	22	20.22	18.43	4	3.76	4	1.24	4	1.24	4	1.24	1	1.25	4	5	1	0.94	4	3.76
10	BNN KABUPATEN SUMENEP	BINAAN	INSPEKTORAT III	19.78	3	23	19.78	16.56	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	1	1.25	4	5	2	1.88	4	3.76
11	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	BINAAN	INSPEKTORAT III	19.78	3	23	19.78	16.55	2	1.88	4	1.24	4	1.24	4	1.24	4	5.00	1	1.25	1	0.94	4	3.76
12	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	BINAAN	INSPEKTORAT III	19.78	3	23	19.78	16.55	2	1.88	4	1.24	4	1.24	4	1.24	4	5.00	1	1.25	1	0.94	4	3.76
13	BNN KABUPATEN BANYUMAS	BINAAN	INSPEKTORAT I	19.69	3	25	19.69	14.37	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	3	3.75	1	1.25	2	1.88	3	2.82
14	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	BINAAN	INSPEKTORAT I	19.62	3	23	19.62	16.24	2	1.88	3	0.93	4	1.24	4	1.24	4	5.00	1	1.25	1	0.94	4	3.76
15	BNN PROVINSI MALUKU UTARA	BINAAN	INSPEKTORAT I	19.38	3	25	19.38	13.75	4	3.76	4	1.24	1	0.31	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
16	BNN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	BINAAN	INSPEKTORAT II	19.38	3	25	19.38	13.75	4	3.76	4	1.24	2	0.62	3	0.93	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
17	BNN KABUPATEN BIMA	BINAAN	INSPEKTORAT II	19.37	2	0	19.37	19.37	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	4	5.00	4	5	1	0.94	4	3.76
18	BNN KOTA PALU	BINAAN	INSPEKTORAT II	19.37	2	22	19.37	19.37	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	4	5.00	4	5	1	0.94	4	3.76
19	BNN PROVINSI NANGGROE ACEH	BINAAN	INSPEKTORAT III	19.34	3	24	19.34	14.68	4	3.76	4	1.24	4	1.24	4	1.24	1	1.25	1	1.25	2	1.88	3	2.82
20	BNN KOTA PONTIANAK	BINAAN	INSPEKTORAT II	19.34	3	24	19.34	14.67	2	1.88	4	1.24	4	1.24	4	1.24	4	5.00	1	1.25	1	0.94	2	1.88
21	DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN	BINAAN	INSPEKTORAT I	19.31	3	23	19.31	15.62	4	3.76	4	1.24	4	1.24	4	1.24	1	1.25	1	1.25	4	3.76	2	1.88
22	BNN KOTA BONTANG	BINAAN	INSPEKTORAT I	19.31	3	23	19.31	15.62	2	1.88	3	0.93	2	0.62	4	1.24	4	5.00	1	1.25	1	0.94	4	3.76
23	BNN KABUPATEN JAYAPURA	BINAAN	INSPEKTORAT II	19.31	3	23	19.31	15.62	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	4	5.00	1	1.25	1	0.94	4	3.76
24	BNN KABUPATEN MIMIKA	BINAAN	INSPEKTORAT I	19.31	3	23	19.31	15.62	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	4	5.00	1	1.25	1	0.94	4	3.76
25	BNN KABUPATEN KARO	BINAAN	INSPEKTORAT III	19.28	3	22	19.28	16.55	2	1.88	4	1.24	4	1.24	4	1.24	4	5.00	1	1.25	1	0.94	4	3.76
26	BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	BINAAN	INSPEKTORAT I	19.19	3	24	19.19	14.38	4	3.76	4	1.24	1	0.31	2	0.62	1	1.25	2	2.5	1	0.94	4	3.76
27	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	BINAAN	INSPEKTORAT II	19.19	3	24	19.19	14.37	4	3.76	4	1.24	4	1.24	3	0.93	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
28	BNN KOTA BANJARMASIN	BINAAN	INSPEKTORAT II	19.19	3	24	19.19	14.37	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	3	3.75	1	1.25	1	0.94	4	3.76
29	BNN KABUPATEN TABALONG	BINAAN	INSPEKTORAT II	19.16	3	23	19.16	15.31	2	1.88	3	0.93	1	0.31	4	1.24	4	5.00	1	1.25	1	0.94	4	3.76
30	BNN KABUPATEN LUMAJANG	BINAAN	INSPEKTORAT III	19.15	4	20	19.15	17.18	2	1.88	4	1.24	3	0.93	3	0.93	2	2.50	4	5	2	1.88	3	2.82
31	BALAI BESAR REHABILITASI BNN	BINAAN	INSPEKTORAT I	19.15	4	22	19.15	12.49	4	3.76	4	1.24	4	1.24	3	0.93	1	1.25	1	1.25	2	1.88	1	0.94
32	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	BINAAN	INSPEKTORAT II	19.12	3	22	19.12	16.24	2	1.88	4	1.24	3	0.93	4	1.24	4	5.00	1	1.25	1	0.94	4	3.76
33	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	BINAAN	INSPEKTORAT I	19.12	3	22	19.12	16.24	2	1.88	4	1.24	3	0.93	4	1.24	1	1.25	4	5	1	0.94	4	3.76
34	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	BINAAN	INSPEKTORAT III	19.12	3	22	19.12	16.24	2	1.88	4	1.24	3	0.93	4	1.24	4	5.00	1	1.25	1	0.94	4	3.76
35	BNN KABUPATEN PELALAWAN	BINAAN	INSPEKTORAT I	19.06	3	25	19.06	13.12	2	1.88	4	1.24	1	0.31	3	0.93	3	3.75	1	1.25	1	0.94	3	2.82
36	BNN KABUPATEN KUNINGAN	BINAAN	INSPEKTORAT I	19.00	3	23	19.00	14.99	2	1.88	4	1.24	2	0.62	4	1.24	4	5.00	1	1.25	1	0.94	3	2.82
37	BNN KOTA TEGAL	BINAAN	INSPEKTORAT I	18.81	3	22	18.81	15.62	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	4	5.00	1	1.25	1	0.94	4	3.76
38	BNN KABUPATEN SINTANG	BINAAN	INSPEKTORAT II	18.81	3	22	18.81	15.62	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	4	5.00	1	1.25	1	0.94	4	3.76
39	BNN KABUPATEN SANGGAU	BINAAN	INSPEKTORAT II	18.81	3	22	18.81	15.62	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	4	5.00	1	1.25	1	0.94	4	3.76
40	BNN KABUPATEN BIREUEN	BINAAN	INSPEKTORAT III	18.81	3	22	18.81	15.62	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	4	5.00	1	1.25	1	0.94	4	3.76
41	BNN KOTA SABANG	BINAAN	INSPEKTORAT III	18.81	3	22	18.81	15.62	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	4	5.00	1	1.25	1	0.94	4	3.76
42	BNN KABUPATEN PIDIE	BINAAN	INSPEKTORAT I	18.81	3	22	18.81	15.62	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	4	5.00	1	1.25	1	0.94	4	3.76
43	LOKA REHABILITASI NARKOBA BNN,	BINAAN	INSPEKTORAT I	18.81	3	22	18.81	15.61	4	3.76	4	1.24	4	1.24	4	1.24	4	5.00	1	1.25	1	0.94	1	0.94
44	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	BINAAN	INSPEKTORAT II	18.75	3	25	18.75	12.49	2	1.88	4	1.24	3	0.93	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
45	BNN KOTA MALANG	BINAAN	INSPEKTORAT III	18.75	3	25	18.75	12.49	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	3	3.75	1	1.25	1	0.94	2	1.88
46	BNN KABUPATEN KENDAL	BINAAN	INSPEKTORAT I	18.72	3	24	18.72	13.43	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	3	3.75	1	1.25	1	0.94	3	2.82
47	BNN KABUPATEN BULELENG	BINAAN	INSPEKTORAT III	18.56	3	24	18.56	13.12	2	1.88	4	1.24	2	0.62	4	1.24	1	1.25	1	1.25	2	1.88	4	3.76
48	BNN KABUPATEN CILACAP	BINAAN	INSPEKTORAT I	18.56	3	24	18.56	13.11	2	1.88	4	1.24	3	0.93	4	1.24	3	3.75	1	1.25	1	0.94	2	1.88
49	BNN KOTA SAMARINDA	BINAAN	INSPEKTORAT I	18.53	3	23	18.53	14.05	2	1.88	4	1.24	3	0.93	4	1.24	3	3.75	1	1.25	1	0.94	3	2.82
50	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	BINAAN	INSPEKTORAT II	18.50	3	22	18.50	15.00	2	1.88	3	0.93	1	0.31	4	1.24	3	3.75	1	1.25	2			

59	BNN PROVINSI JAWA TIMUR	BINAAN	INSPEKTORAT III	18.25	3	24	18.25	12.49	4	3.76	4	1.24	3	0.93	4	1.24	1	1.25	1	1.25	2	1.88	1	0.94
60	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	BINAAN	INSPEKTORAT II	18.19	3	22	18.19	14.37	2	1.88	3	0.93	2	0.62	4	1.24	3	3.75	1	1.25	1	0.94	4	3.76
61	BNN KABUPATEN KOLAKA	BINAAN	INSPEKTORAT II	18.19	3	22	18.19	14.37	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	3	3.75	1	1.25	1	0.94	4	3.76
62	BNN KABUPATEN CIANJUR	BINAAN	INSPEKTORAT I	18.03	3	22	18.03	14.05	2	1.88	4	1.24	3	0.93	4	1.24	3	3.75	1	1.25	1	0.94	3	2.82
63	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	SENTUHAN	INSPEKTORAT II	18.00	3	21	18.00	15.00	2	1.88	3	0.93	1	0.31	3	0.93	4	5.00	1	1.25	1	0.94	4	3.76
64	BNN KABUPATEN BALANGAN	BINAAN	INSPEKTORAT I	17.94	3	24	17.94	11.87	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
65	BNN PROVINSI SUMATERA BARAT	BINAAN	INSPEKTORAT II	17.91	3	23	17.91	12.81	4	3.76	4	1.24	1	0.31	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	3	2.82
66	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	BINAAN	INSPEKTORAT III	17.90	3	23	17.90	12.80	2	1.88	4	1.24	4	1.24	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
67	BNN PROVINSI JAMBI	BINAAN	INSPEKTORAT III	17.88	3	22	17.88	13.75	4	3.76	4	1.24	1	0.31	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
68	BNN PROVINSI PAPUA BARAT	BINAAN	INSPEKTORAT II	17.88	3	22	17.88	13.75	4	3.76	4	1.24	2	0.62	3	0.93	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
69	BNN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	BINAAN	INSPEKTORAT I	17.87	3	22	17.87	13.74	4	3.76	4	1.24	4	1.24	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	3	2.82
70	BNN PROVINSI SULAWESI BARAT	BINAAN	INSPEKTORAT III	17.87	3	22	17.87	13.74	4	3.76	4	1.24	4	1.24	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	3	2.82
71	BNN PROVINSI BANTEN	BINAAN	INSPEKTORAT II	17.87	3	22	17.87	13.74	4	3.76	4	1.24	4	1.24	4	1.24	1	1.25	1	1.25	2	1.88	2	1.88
72	BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	BINAAN	INSPEKTORAT I	17.87	3	22	17.87	13.74	4	3.76	4	1.24	4	1.24	4	1.24	1	1.25	1	1.25	2	1.88	2	1.88
73	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	BINAAN	INSPEKTORAT III	17.87	3	22	17.87	13.74	2	1.88	4	1.24	3	0.93	4	1.24	2	2.50	1	1.25	1	0.94	4	3.76
74	BNN KOTA PALANGKARAYA	SENTUHAN	INSPEKTORAT I	17.87	3	22	17.87	13.74	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	4	5.00	1	1.25	1	0.94	2	1.88
75	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	BINAAN	INSPEKTORAT II	17.78	3	24	17.78	11.56	2	1.88	3	0.93	1	0.31	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
76	BNN PROVINSI SUMATERA UTARA	BINAAN	INSPEKTORAT III	17.75	3	23	17.75	12.49	4	3.76	4	1.24	3	0.93	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	2	1.88
77	DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN	BINAAN	INSPEKTORAT III	17.44	3	23	17.44	11.87	4	3.76	4	1.24	1	0.31	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	2	1.88
78	BNN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	BINAAN	INSPEKTORAT II	17.41	3	22	17.41	12.81	4	3.76	4	1.24	1	0.31	4	1.24	1	1.25	1	1.25	2	1.88	2	1.88
79	BNN PROVINSI SULAWESI SELATAN	BINAAN	INSPEKTORAT I	17.40	3	22	17.40	12.80	4	3.76	4	1.24	4	1.24	4	1.24	1	1.25	1	1.25	2	1.88	1	0.94
80	BNN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA	BINAAN	INSPEKTORAT II	17.40	3	22	17.40	12.80	4	3.76	4	1.24	4	1.24	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	2	1.88
81	SEKRETARIAT UTAMA	BINAAN	INSPEKTORAT II	17.37	3	21	17.37	13.74	4	3.76	4	1.24	4	1.24	4	1.24	1	1.25	1	1.25	2	1.88	2	1.88
82	BNN PROVINSI BENGKULU	BINAAN	INSPEKTORAT I	17.31	3	19	17.31	15.62	4	3.76	4	1.24	3	0.93	4	1.24	1	1.25	2	2.5	2	1.88	3	2.82
83	DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN	BINAAN	INSPEKTORAT III	16.94	3	22	16.94	11.87	4	3.76	4	1.24	1	0.31	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	2	1.88
84	BNN PROVINSI LAMPUNG	BINAAN	INSPEKTORAT I	16.56	2	24	16.56	16.56	4	3.76	4	1.24	4	1.24	4	1.24	1	1.25	1	1.25	3	2.82	4	3.76
85	BNN PROVINSI RIAU	BINAAN	INSPEKTORAT I	16.19	3	13	16.19	19.37	4	3.76	4	1.24	4	1.24	4	1.24	1	1.25	4	5	2	1.88	4	3.76
86	BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	BINAAN	INSPEKTORAT II	15.93	2	18	15.93	15.93	4	3.76	4	1.24	2	0.62	4	1.24	1	1.25	4	5	1	0.94	2	1.88
87	BNN PROVINSI JAWA BARAT	BINAAN	INSPEKTORAT I	15.91	3	19	15.91	12.81	4	3.76	4	1.24	1	0.31	4	1.24	1	1.25	1	1.25	2	1.88	2	1.88
88	PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI	BINAAN	INSPEKTORAT III	15.90	3	19	15.90	12.80	4	3.76	4	1.24	4	1.24	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	2	1.88
89	BNN PROVINSI JAWA TENGAH	BINAAN	INSPEKTORAT I	15.78	3	20	15.78	11.55	4	3.76	4	1.24	3	0.93	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	1	0.94
90	BNN PROVINSI BALI	BINAAN	INSPEKTORAT III	15.43	3	19	15.43	11.86	4	3.76	4	1.24	4	1.24	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	1	0.94
91	BNN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA	BINAAN	INSPEKTORAT II	15.40	3	18	15.40	12.80	4	3.76	4	1.24	4	1.24	4	1.24	1	1.25	1	1.25	2	1.88	1	0.94
92	INSPEKTORAT UTAMA	BINAAN	INSPEKTORAT II	14.34	4	15	14.34	12.81	4	3.76	4	1.24	1	0.31	4	1.24	1	1.25	1	1.25	2	1.88	2	1.88
93	BNN PROVINSI GORONTALO	BINAAN	INSPEKTORAT III	13.44	1	0	13.44	13.44	4	3.76	4	1.24	1	0.31	3	0.93	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
94	DEPUTI BIDANG REHABILITASI	BINAAN	INSPEKTORAT I	12.91	3	13	12.91	12.81	4	3.76	4	1.24	1	0.31	4	1.24	1	1.25	1	1.25	2	1.88	2	1.88
95	DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJASAMA	BINAAN	INSPEKTORAT III	12.81	2	0	12.81	12.81	4	3.76	4	1.24	1	0.31	4	1.24	1	1.25	1	1.25	2	1.88	2	1.88
96	BNN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	BINAAN	INSPEKTORAT I	11.94	3	12	11.94	11.87	4	3.76	4	1.24	1	0.31	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	2	1.88
97	PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	BINAAN	INSPEKTORAT III	11.86	2	0	11.86	11.86	4	3.76	4	1.24	4	1.24	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	1	0.94
98	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	SENTUHAN	INSPEKTORAT III	17.72	3	22	17.72	13.44	2	1.88	3	0.93	1	0.31	4	1.24	1	1.25	1	1.25	3	2.82	4	3.76
99	BNN KOTA CILEGON	SENTUHAN	INSPEKTORAT II	17.72	3	22	17.72	13.43	2	1.88	4	1.24	2	0.62	4	1.24	2	2.50	1	1.25	1	0.94	4	3.76
100	BNN KABUPATEN GARUT	SENTUHAN	INSPEKTORAT I	17.72	3	22	17.72	13.43	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	3	3.75	1	1.25	1	0.94	3	2.82
101	BNN KOTA MOJOKERTO	SENTUHAN	INSPEKTORAT III	17.59	3	23	17.59	12.18	2	1.88	4	1.24	2	0.62	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
102	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	SENTUHAN	INSPEKTORAT III	17.56	3	22	17.56	13.12	2	1.88	4	1.24	2	0.62	4	1.24	1	1.25	1	1.25	2	1.88	4	3.76
103	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	SENTUHAN	INSPEKTORAT III	17.56	3	22	17.56	13.12	2	1.88	4	1.24	2	0.62	4	1.24	1	1.25	1	1.25	2	1.88	4	3.76
104	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	SENTUHAN	INSPEKTORAT III	17.56	3	22	17.56	13.12	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	2	2.50	1	1.25	1	0.94	4	3.76
105	BNN KABUPATEN BANTUL	SENTUHAN	INSPEKTORAT III	17.56	3	22	17.56	13.11	2	1.88	3	0.93	4	1.24	4	1.24	3	3.75	1	1.25	1	0.94	2	1.88
106	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	SENTUHAN	INSPEKTORAT III	17.56	3	22	17.56	13.11	2	1.88	4	1.24	3	0.93	4	1.24	3	3.75	1	1.25	1	0.94	2	1.88
107	BNN KOTA TASIKMALAYA	SENTUHAN	INSPEKTORAT I	17.50	3	20	17.50	15.00	2	1.88	3	0.93	1	0.31	4	1.24	3	3.75	1	1.25	2	1.88	4	3.76
108	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	SENTUHAN	INSPEKTORAT II	17.49	2	0	17.49	17.49	2	1.88	3	0.93	4	1.24	4	1.24	4	5.00	2	2.5	1	0.94	4	3.76
109	BNN KOTA GORONTALO	SENTUHAN	INSPEKTORAT III	17.49	2	12	17.49	17.49	2	1.88	4	1.24	4	1.24	3	0.93	2	2.50	4	5	1	0.94	4	3.76
110	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	SENTUHAN	INSPEKTORAT I	17.44	3	23	17.44	11.87	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
111	BNN KOTA JAKARTA UTARA	SENTUHAN	INSPEKTORAT III	17.40	3	22	17.40	12.80	2	1.88	4	1.24	4	1.24	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
112	BNN KABUPATEN MAGELANG	SENTUHAN	INSPEKTORAT I	17.40	3	22	17.40	12.80	2	1.88	3	0.93	3	0.93	4	1.24	3	3.75	1	1.25	1	0.94	2	1.88
113	BNN KABUPATEN BATANGHARI	SENTUHAN	INSPEKTORAT III	17.28	3	23	17.28	11.56	2	1.88	4	1.24	1	0.31	3	0.93	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
114	BNN KOTA KENDARI	SENTUHAN	INSPEKTORAT II	17.28	3	18	17.28	16.55	2	1.88	4	1.24	4	1.24	4	1.24	4	5.00	1	1.25	1	0.94	4	3.76
115	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	SENTUHAN	INSPEKTORAT III	17.25	3	22	17.25	12.50	2	1.88	3	0.93	1	0.31	4	1.24	1	1.25	1	1.25	2	1.88	4	3.76
116	BNN KOTA DENPASAR	SENTUHAN	INSPEKTORAT III	17.25	3	22	17.25	12.49	2	1.88	4	1.24	3	0.93	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
117	BNN KOTA CIREBON	SENTUHAN	INSPEKTORAT I	17.25	3	22	17.25	12.49	2	1.88	4	1.24	3	0.93	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
118	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	SENTUHAN	INSPEKTORAT III	17.25	3	22	17.25	12.49	2	1.88	4	1.24	3	0.93	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
119	BNN KOTA																							

129	BNN KOTA PEKANBARU	SENTUHAN	INSPEKTORAT I	16.87	3	20	16.87	13.74	2	1.88	4	1.24	4	1.24	4	1.24	1	1.25	1	1.25	2	1.88	4	3.76
130	BNN KOTA BANDA ACEH	SENTUHAN	INSPEKTORAT III	16.78	3	22	16.78	11.56	2	1.88	3	0.93	1	0.31	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
131	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	SENTUHAN	INSPEKTORAT III	16.78	3	22	16.78	11.56	2	1.88	3	0.93	1	0.31	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
132	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	SENTUHAN	INSPEKTORAT III	16.78	3	22	16.78	11.56	2	1.88	4	1.24	1	0.31	3	0.93	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
133	BNN KABUPATEN BANGKA	SENTUHAN	INSPEKTORAT II	16.78	3	22	16.78	11.56	2	1.88	4	1.24	1	0.31	3	0.93	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
134	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	SENTUHAN	INSPEKTORAT I	16.75	3	21	16.75	12.49	2	1.88	3	0.93	4	1.24	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
135	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	SENTUHAN	INSPEKTORAT I	16.75	3	21	16.75	12.49	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	3	3.75	1	1.25	1	0.94	2	1.88
136	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	SENTUHAN	INSPEKTORAT II	16.62	3	22	16.62	11.24	2	1.88	4	1.24	2	0.62	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	3	2.82
137	BNN KABUPATEN CIAMIS	SENTUHAN	INSPEKTORAT I	16.47	3	22	16.47	10.93	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	3	2.82
138	LOKA REHABILITASI BNN, DELI SERDANG	SENTUHAN	INSPEKTORAT III	16.43	3	21	16.43	11.86	4	3.76	4	1.24	4	1.24	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	1	0.94
139	BNN KOTA BINJAI	SENTUHAN	INSPEKTORAT III	16.34	3	18	16.34	14.68	2	1.88	4	1.24	2	0.62	4	1.24	3	3.75	1	1.25	1	0.94	4	3.76
140	BNN KABUPATEN LANGKAT	SENTUHAN	INSPEKTORAT III	16.25	3	20	16.25	12.49	2	1.88	4	1.24	3	0.93	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
141	BNN KABUPATEN SLEMAN	SENTUHAN	INSPEKTORAT II	16.25	3	20	16.25	12.49	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	3	3.75	1	1.25	1	0.94	2	1.88
142	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	SENTUHAN	INSPEKTORAT I	16.24	2	22	16.24	16.24	2	1.88	4	1.24	4	1.24	4	1.24	3	3.75	1	1.25	2	1.88	4	3.76
143	BNN KOTA TARAKAN	SENTUHAN	INSPEKTORAT III	16.24	2	0	16.24	16.24	2	1.88	4	1.24	3	0.93	4	1.24	4	5.00	1	1.25	1	0.94	4	3.76
144	BNN KABUPATEN MUNA	SENTUHAN	INSPEKTORAT II	16.24	2	18	16.24	16.24	2	1.88	4	1.24	3	0.93	4	1.24	4	5.00	1	1.25	1	0.94	4	3.76
145	BNN KOTA TEBING TINGGI	SENTUHAN	INSPEKTORAT III	16.24	1	0	16.24	16.24	2	1.88	4	1.24	3	0.93	4	1.24	4	5.00	1	1.25	1	0.94	4	3.76
146	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	SENTUHAN	INSPEKTORAT III	16.24	2	18	16.24	16.24	2	1.88	4	1.24	3	0.93	4	1.24	4	5.00	1	1.25	1	0.94	4	3.76
147	BNN KABUPATEN ASAHAN	SENTUHAN	INSPEKTORAT III	16.24	2	22	16.24	16.24	2	1.88	4	1.24	3	0.93	4	1.24	4	5.00	1	1.25	1	0.94	4	3.76
148	BNN KOTA TUAL	SENTUHAN	INSPEKTORAT II	16.24	2	22	16.24	16.24	2	1.88	4	1.24	4	1.24	3	0.93	1	1.25	4	5	1	0.94	4	3.76
149	BNN KABUPATEN KARANGASEM	SENTUHAN	INSPEKTORAT III	16.19	3	18	16.19	14.37	2	1.88	3	0.93	2	0.62	4	1.24	3	3.75	1	1.25	1	0.94	4	3.76
150	BNN KOTA BENGKULU	SENTUHAN	INSPEKTORAT I	16.19	3	18	16.19	14.37	2	1.88	3	0.93	2	0.62	4	1.24	3	3.75	1	1.25	1	0.94	4	3.76
151	BNN KOTA BATU	SENTUHAN	INSPEKTORAT III	16.09	3	20	16.09	12.18	2	1.88	4	1.24	2	0.62	4	1.24	1	1.25	1	1.25	2	1.88	3	2.82
152	BNN KABUPATEN PASURUAN	SENTUHAN	INSPEKTORAT III	16.03	3	18	16.03	14.06	2	1.88	3	0.93	1	0.31	4	1.24	3	3.75	1	1.25	1	0.94	4	3.76
153	BNN KOTA DUMAI	SENTUHAN	INSPEKTORAT I	15.94	3	20	15.94	11.88	2	1.88	3	0.93	1	0.31	1	0.31	2	2.50	1	1.25	1	0.94	4	3.76
154	BNN KABUPATEN SOLOK	SENTUHAN	INSPEKTORAT II	15.93	2	22	15.93	15.93	2	1.88	3	0.93	3	0.93	4	1.24	4	5.00	1	1.25	1	0.94	4	3.76
155	BNN KABUPATEN GAYO LUES	SENTUHAN	INSPEKTORAT III	15.93	2	22	15.93	15.93	2	1.88	4	1.24	2	0.62	4	1.24	4	5.00	1	1.25	1	0.94	4	3.76
156	BNN KABUPATEN BOALEMO	SENTUHAN	INSPEKTORAT III	15.62	2	15	15.62	15.62	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	4	5.00	1	1.25	1	0.94	4	3.76
157	BNN KABUPATEN BANGGAIKEPULAUAN	SENTUHAN	INSPEKTORAT II	15.62	2	23	15.62	15.62	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	4	5.00	1	1.25	1	0.94	4	3.76
158	BALAI REHABILITASI BNN BADDOKA	SENTUHAN	INSPEKTORAT I	15.61	2	0	15.61	15.61	3	2.82	4	1.24	4	1.24	4	1.24	4	5.00	1	1.25	2	1.88	1	0.94
159	BNN KABUPATEN KARAWANG	SENTUHAN	INSPEKTORAT I	15.56	3	18	15.56	13.12	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	2	2.50	1	1.25	1	0.94	4	3.76
160	BNN KABUPATEN GRESIK	SENTUHAN	INSPEKTORAT III	15.44	3	19	15.44	11.87	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
161	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	SENTUHAN	INSPEKTORAT III	15.41	3	18	15.41	12.81	2	1.88	4	1.24	1	0.31	3	0.93	2	2.50	1	1.25	1	0.94	4	3.76
162	BNN KOTA BANDUNG	SENTUHAN	INSPEKTORAT I	15.40	3	18	15.40	12.80	2	1.88	4	1.24	4	1.24	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
163	BNN KABUPATEN NGANJUK	SENTUHAN	INSPEKTORAT III	15.40	3	18	15.40	12.80	2	1.88	4	1.24	3	0.93	4	1.24	2	2.50	1	1.25	1	0.94	3	2.82
164	BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	SENTUHAN	INSPEKTORAT I	15.31	2	19	15.31	15.31	2	1.88	3	0.93	1	0.31	4	1.24	4	5.00	1	1.25	1	0.94	4	3.76
165	BNN KOTA BAU-BAU	SENTUHAN	INSPEKTORAT II	15.31	2	23	15.31	15.31	2	1.88	3	0.93	1	0.31	4	1.24	4	5.00	1	1.25	1	0.94	4	3.76
166	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	SENTUHAN	INSPEKTORAT III	15.31	2	0	15.31	15.31	2	1.88	3	0.93	1	0.31	4	1.24	4	5.00	1	1.25	1	0.94	4	3.76
167	BNN KOTA PALOPO	SENTUHAN	INSPEKTORAT I	15.30	2	25	15.30	15.30	2	1.88	4	1.24	4	1.24	4	1.24	3	3.75	1	1.25	1	0.94	4	3.76
168	BNN KABUPATEN NUNUKAN	SENTUHAN	INSPEKTORAT III	14.99	2	0	14.99	14.99	2	1.88	4	1.24	2	0.62	4	1.24	4	5.00	1	1.25	1	0.94	3	2.82
169	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	SENTUHAN	INSPEKTORAT I	14.99	2	23	14.99	14.99	2	1.88	3	0.93	4	1.24	4	1.24	3	3.75	1	1.25	1	0.94	4	3.76
170	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	SENTUHAN	INSPEKTORAT III	14.99	2	22	14.99	14.99	2	1.88	3	0.93	4	1.24	4	1.24	3	3.75	1	1.25	1	0.94	4	3.76
171	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	SENTUHAN	INSPEKTORAT I	14.78	3	18	14.78	11.56	2	1.88	3	0.93	1	0.31	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
172	BNN KOTA PRABUMULIH	SENTUHAN	INSPEKTORAT III	14.69	2	0	14.69	14.69	2	1.88	4	1.24	1	0.31	2	0.62	3	3.75	1	1.25	2	1.88	4	3.76
173	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	SENTUHAN	INSPEKTORAT III	14.68	2	0	14.68	14.68	2	1.88	3	0.93	3	0.93	4	1.24	3	3.75	1	1.25	1	0.94	4	3.76
174	BNN KOTA SURAKARTA	SENTUHAN	INSPEKTORAT I	14.37	2	0	14.37	14.37	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	3	3.75	1	1.25	1	0.94	4	3.76
175	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	SENTUHAN	INSPEKTORAT III	14.37	2	24	14.37	14.37	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	3	3.75	1	1.25	1	0.94	4	3.76
176	BNN KOTA BALIKPAPAN	SENTUHAN	INSPEKTORAT I	14.37	2	0	14.37	14.37	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	3	3.75	1	1.25	1	0.94	4	3.76
177	BNN KABUPATEN BONE	SENTUHAN	INSPEKTORAT I	14.37	1	24	14.37	14.37	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	3	3.75	1	1.25	1	0.94	4	3.76
178	BNN KOTA SAWAHLUNTO	SENTUHAN	INSPEKTORAT II	14.37	2	18	14.37	14.37	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	3	3.75	1	1.25	1	0.94	4	3.76
179	BNN KOTA PAYAKUMBUH	SENTUHAN	INSPEKTORAT II	14.37	2	18	14.37	14.37	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	3	3.75	1	1.25	1	0.94	4	3.76
180	BNN KOTA DEPOK	SENTUHAN	INSPEKTORAT I	14.22	3	15	14.22	13.43	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	3	3.75	1	1.25	1	0.94	3	2.82
181	BNN KOTA BATAM	SENTUHAN	INSPEKTORAT I	14.19	3	14	14.19	14.37	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	3	3.75	1	1.25	1	0.94	4	3.76
182	LOKA REHABILITASI NARKOBA BNN, BATAM	SENTUHAN	INSPEKTORAT I	14.18	3	14	14.18	14.36	4	3.76	4	1.24	4	1.24	4	1.24	3	3.75	1	1.25	1	0.94	1	0.94
183	BNN KABUPATEN TUBAN	PANTAUAN	INSPEKTORAT III	14.06	2	0	14.06	14.06	2	1.88	3	0.93	1	0.31	4	1.24	3	3.75	1	1.25	1	0.94	4	3.76
184	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	PANTAUAN	INSPEKTORAT III	14.06	2	22	14.06	14.06	2	1.88	3	0.93	1	0.31	4	1.24	3	3.75	1	1.25	1	0.94	4	3.76
185	BNN KABUPATEN BOGOR	PANTAUAN	INSPEKTORAT I	14.00	3	18	14.00	9.99	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	2	1.88
186	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	PANTAUAN	INSPEKTORAT III	13.97	3	12	13.97	15.93	2	1.88	4	1.24	2	0.62	4	1.24	1	1.25	4	5	1	0.94	4	3.76
187	BNN KABUPATEN WAY KANAN	PANTAUAN	INSPEKTORAT I	13.75	2	0	13.75	13.75	2	1.88	3	0.93	1	0.31	4	1.24	2	2.50	1	1.25	2	1.88	4	3.76
188	BNN KOTA TANGERANG	PANTAUAN	INSPEKTORAT II	13.74	2	0	13.74	13.74	2	1.88	4	1.24	2	0.62	4	1.24	3	3.75	1	1.25	1			

199	BNN KOTA BITUNG	PANTAUAN	INSPEKTORAT III	12.53	3	11	12.53	14.05	2	1.88	4	1.24	4	1.24	4	1.24	2	2.50	1	1.25	1	0.94	4	3.76
200	BNN KOTA YOGYAKARTA	PANTAUAN	INSPEKTORAT II	12.49	2	24	12.49	12.49	2	1.88	3	0.93	4	1.24	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
201	BNN KABUPATEN GIANYAR	PANTAUAN	INSPEKTORAT III	12.49	2	0	12.49	12.49	2	1.88	4	1.24	3	0.93	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
202	BNN KABUPATEN KEDIRI	PANTAUAN	INSPEKTORAT III	12.49	2	0	12.49	12.49	2	1.88	4	1.24	3	0.93	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
203	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	PANTAUAN	INSPEKTORAT I	12.49	2	24	12.49	12.49	2	1.88	4	1.24	3	0.93	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
204	BNN KABUPATEN POSO	PANTAUAN	INSPEKTORAT II	12.49	2	23	12.49	12.49	2	1.88	4	1.24	3	0.93	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
205	BNN KOTA SINGKAWANG	PANTAUAN	INSPEKTORAT II	12.49	2	0	12.49	12.49	2	1.88	4	1.24	4	1.24	3	0.93	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
206	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	PANTAUAN	INSPEKTORAT II	12.49	2	0	12.49	12.49	2	1.88	3	0.93	2	0.62	4	1.24	3	3.75	1	1.25	1	0.94	2	1.88
207	BNN KOTA MATARAM	PANTAUAN	INSPEKTORAT II	12.49	2	0	12.49	12.49	2	1.88	3	0.93	2	0.62	4	1.24	3	3.75	1	1.25	1	0.94	2	1.88
208	BNN KOTA PANGKAL PINANG	PANTAUAN	INSPEKTORAT II	12.49	2	0	12.49	12.49	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	3	3.75	1	1.25	1	0.94	2	1.88
209	BNN KOTA SURABAYA	PANTAUAN	INSPEKTORAT III	12.49	2	0	12.49	12.49	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	3	3.75	1	1.25	1	0.94	2	1.88
210	BNN KOTA TANJUNG PINANG	PANTAUAN	INSPEKTORAT I	12.43	3	13	12.43	11.86	2	1.88	4	1.24	3	0.93	4	1.24	2	2.50	1	1.25	1	0.94	2	1.88
211	BNN KABUPATEN SUKABUMI	PANTAUAN	INSPEKTORAT I	12.18	2	22	12.18	12.18	2	1.88	4	1.24	2	0.62	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
212	BNN KABUPATEN MALANG	PANTAUAN	INSPEKTORAT III	12.18	2	0	12.18	12.18	2	1.88	4	1.24	2	0.62	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
213	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	PANTAUAN	INSPEKTORAT II	12.18	2	24	12.18	12.18	2	1.88	3	0.93	3	0.93	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
214	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	PANTAUAN	INSPEKTORAT III	12.18	2	0	12.18	12.18	2	1.88	3	0.93	4	1.24	3	0.93	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
215	BNN KABUPATEN MOROWALI	PANTAUAN	INSPEKTORAT II	12.18	2	0	12.18	12.18	2	1.88	4	1.24	4	1.24	2	0.62	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
216	BNN KOTA MANADO	PANTAUAN	INSPEKTORAT III	12.06	3	11	12.06	13.12	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	2	2.50	1	1.25	1	0.94	4	3.76
217	BNN KABUPATEN BLITAR	PANTAUAN	INSPEKTORAT III	11.87	2	0	11.87	11.87	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
218	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	PANTAUAN	INSPEKTORAT II	11.87	2	0	11.87	11.87	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
219	BNN KOTA LANGSA	PANTAUAN	INSPEKTORAT III	11.87	2	0	11.87	11.87	2	1.88	4	1.24	1	0.31	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
220	BNN KABUPATEN BATU BARA	PANTAUAN	INSPEKTORAT III	11.56	2	22	11.56	11.56	2	1.88	3	0.93	1	0.31	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
221	BNN KOTA METRO	PANTAUAN	INSPEKTORAT I	11.25	2	25	11.25	11.25	2	1.88	2	0.62	1	0.31	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	4	3.76
222	BNN KABUPATEN BADUNG	PANTAUAN	INSPEKTORAT III	10.92	2	0	10.92	10.92	2	1.88	4	1.24	4	1.24	4	1.24	1	1.25	1	1.25	1	0.94	2	1.88
223	BNN KABUPATEN GORONTALO	PANTAUAN	INSPEKTORAT III	10.53	3	7	10.53	14.06	2	1.88	3	0.93	1	0.31	4	1.24	3	3.75	1	1.25	1	0.94	4	3.76

OBJEK PENGAWASAN INTERN T.A. 2024

A. OBJEK PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT I

Objek Pengawasan Intern Inspektorat I pada tahun 2024 terdiri dari 72 satker meliputi 3 satker pusat, 11 BNNP, dan 54 BNNK/Kota, 2 Balai Rehabilitasi dan 2 Loka Rehabilitasi.

INSPEKTORAT I					
No.	Satker Binaan	No.	Satker Sentuhan	No.	Satker Pantauan
1.	DEPUTI PEMBERANTASAN	1.	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	1.	BNN KOTA KUPANG
2.	DEPUTI REHABILITASI	2.	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	2.	BALAI REHABILITASI BNN TANAH MERAH
3.	BALAI REHABILITASI BESAR	3.	BNN KOTA BATAM	3.	BNN KABUPATEN BOGOR
4.	LOKA REHABILITASI BNN KALIANDA	4.	LOKA REHABILITASI NARKOBA BNN, BATAM KEPULAUAN RIA	4.	BNN KABUPATEN SUKABUMI
5.	BNN PROVINSI LAMPUNG	5.	BNN KOTA PEKANBARU	5.	BNN KABUPATEN BATANG
6.	BNN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	6.	BNN KOTA DUMAI	6.	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
7.	BNN PROVINSI RIAU	7.	BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	7.	BNN KABUPATEN KARIMUN
8.	BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	8.	BNN KABUPATEN MAGELANG	8.	BNN KOTA TANJUNG PINANG
9.	BNN PROVINSI JAWA TENGAH	9.	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	9.	BNN KABUPATEN WAY KANAN
10.	BNN PROVINSI JAWA BARAT	10.	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	10.	BNN KABUPATEN TANGGAMUS
11.	BNN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	11.	BNN KOTA SURAKARTA	11.	BNN KOTA METRO
12.	BNN PROVINSI SULAWESI SELATAN	12.	BNN KABUPATEN GARUT		
13.	BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	13.	BNN KOTA TASIKMALAYA		
14.	BNN PROVINSI BENGKULU	14.	BNN KOTA CIREBON		
15.	BNN PROVINSI MALUKU	15.	BNN KOTA CIMAHI		

	UTARA		
16.	BNN KABUPATEN PIDIE	16.	BNN KABUPATEN SUMEDANG
17.	BNN KABUPATEN MIMIKA	17.	BNN KABUPATEN CIAMIS
18.	BNN KABUPATEN BALANGAN	18.	BNN KABUPATEN KARAWANG
19.	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	19.	BNN KOTA BANDUNG
20.	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	20.	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT
21.	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	21.	BNN KOTA DEPOK
22.	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	22.	BNN KOTA BALIKPAPAN
23.	BNN KOTA SAMARINDA	23.	BNN KABUPATEN TANA TORAJA
24.	BNN KOTA BONTANG	24.	BALAI REHABILITASI BNN BADDOKA
25.	BNN KABUPATEN KUNINGAN	25.	BNN KOTA PALOPO
26.	BNN KABUPATEN CIANJUR	26.	BNN KABUPATEN BONE
27.	BNN KABUPATEN BANYUMAS	27.	BNN KABUPATEN ROTE NDAO
28.	BNN KOTA TEGAL	28.	BNN KABUPATEN BELU
29.	BNN KABUPATEN KENDAL	29.	BNN KOTA BENGKULU
30.	BNN KABUPATEN CILACAP		
31.	BNN KOTA PALANGKARAYA		
32.	BNN KABUPATEN PELALAWAN		

Keterangan Zonasi Objek Pengawasan:

1. **Satker Binaan** = Satker zona merah yang merupakan satker mandatori yang pengawasannya wajib untuk dilakukan audit;
2. **Satker Sentuhan** = Satker zona kuning yang pengawasannya dilakukan melalui audit dan/atau pengawasan lainnya;
3. **Satker Pantauan** = Satker zona hijau yang pengawasannya dilakukan melalui pengawasan lainnya berupa konsultasi dan asistensi.

B. OBJEK PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT II

Objek Pengawasan Intern Inspektorat II pada tahun 2024 terdiri dari 60 satker meliputi 3 satker pusat, 12 BNNP, dan 45 BNNK/Kota.

INSPEKTORAT II					
Satker Binaan		Satker Sentuhan		Satker Pantauan	
1.	Sekretaris Utama BNN	1.	BNN KABUPATEN SOLOK	1.	BNN KABUPATEN BELITUNG
2.	Inspektorat Utama BNN	2.	BNN KOTA SAWAHLUNTO	2.	BNN KOTA PANGKAL PINANG
3.	Pusat Pengembangan Sumaber Daya Manusia (PPSDM)	3.	BNN KOTA PAYAKUMBUH	3.	BNN KOTA TANGERANG
4.	BNN PROVINSI SUMATERA BARAT	4.	BNN KABUPATEN BANGKA	4.	BNN KOTA YOGYAKARTA
5.	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	5.	BNN KOTA CILEGON	5.	BNN KABUPATEN SUMBAWA
6.	BNN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	6.	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	6.	BNN KOTA MATARAM
7.	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	7.	BNN KABUPATEN BANTUL	7.	BNN KOTA SINGKAWANG
8.	BNN PROVINSI BANTEN	8.	BNN KABUPATEN SLEMAN	8.	BNN KABUPATEN TANAH LAUT
9.	BNN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	9.	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	9.	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
10.	BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	10.	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	10.	BNN KABUPATEN BARITO KUALA
11.	BNN KABUPATEN BIMA	11.	BNN KOTA BANJARBARU	11.	BNN KABUPATEN POSO
12.	BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	12.	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	12.	BNN KABUPATEN MOROWALI
13.	BNN KOTA PONTIANAK	13.	BNN KOTA KENDARI		
14.	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	14.	BNN KABUPATEN MUNA		
15.	BNN KABUPATEN SINTANG	15.	BNN KOTA BAU-BAU		
16.	BNN KABUPATEN SANGGAU	16.	BNN KOTA TUAL		
17.	BNN KABUPATEN KUBU RAYA				
18.	BNN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN				
19.	BNN KOTA BANJARMASIN				
20.	BNN KABUPATEN TABALONG				
21.	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA				
22.	BNN PROVINSI SULAWESI TENGAH				
23.	BNN KOTA PALU				
24.	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA				

25.	BNNK DONGGALA
26.	BNN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
27.	BNN KABUPATEN KOLAKA
28.	BNN PROVINSI MALUKU
29.	BNN KABUPATEN BURU SELATAN
30.	BNNP PAPUA
31.	BNN KABUPATEN JAYAPURA
32.	BNN PROVINSI PAPUA BARAT

Keterangan Zonasi Objek Pengawasan:

1. **Satker Binaan** = Satker zona merah yang merupakan satker mandatori yang pengawasannya wajib untuk dilakukan audit;
2. **Satker Sentuhan** = Satker zona kuning yang pengawasannya dilakukan melalui audit dan/atau pengawasan lainnya;
3. **Satker Pantauan** = Satker zona hijau yang pengawasannya dilakukan melalui pengawasan lainnya berupa konsultasi dan asistensi.

C. OBJEK PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT III

Objek Pengawasan Intern Inspektorat III pada tahun 2024 terdiri dari 92 satker meliputi 5 satker pusat, 11 BNNP, dan 75 BNNK/Kota, dan 1 Loka Rehabilitasi.

INSPEKTORAT III					
Satker Binaan		Satker Sentuhan		Satker Pantauan	
1.	DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1.	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	1.	BNN KABUPATEN TUBAN
2.	DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN	2.	BNN KOTA MOJOKERTO	2.	BNN KABUPATEN OGAN ILIR
3.	PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI	3.	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	3.	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
4.	DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJASAMA	4.	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	4.	BNN KOTA LUBUKLINGGAU
5.	PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	5.	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	5.	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
6.	BNN PROVINSI DKI JAKARTA	6.	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	6.	BNN KOTA KEDIRI
7.	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	7.	BNN KOTA GORONTALO	7.	BNN KOTA BITUNG
8.	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	8.	BNN KOTA JAKARTA UTARA	8.	BNN KABUPATEN GIANYAR
9.	BNN KABUPATEN SUMENEP	9.	BNN KABUPATEN BATANGHARI	9.	BNN KABUPATEN KEDIRI
10.	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	10.	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	10.	BNN KOTA SURABAYA
11.	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	11.	BNN KOTA DENPASAR	11.	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG
12.	BNN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	12.	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	12.	BNN KABUPATEN MALANG
13.	BNN KABUPATEN KARO	13.	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	13.	BNN KOTA MANADO
14.	BNN KABUPATEN LUMAJANG	14.	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	14.	BNN KABUPATEN BLITAR
15.	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	15.	BNN KABUPATEN SIDOARJO	15.	BNN KOTA LANGSA
16.	BNN KABUPATEN BIREUEN	16.	BNN KOTA JAMBI	16.	BNN KABUPATEN BATU BARA
17.	BNN KOTA SABANG	17.	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	17.	BNN KABUPATEN BADUNG
18.	BNN KABUPATEN PIDIE	18.	BNN KOTA BANDA ACEH	18.	BNN KABUPATEN GORONTALO
19.	BNN KOTA MALANG	19.	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE		
20.	BNN KABUPATEN BULELENG	20.	LOKA REHABILITASI BNN, DELI SERDANG SUMATERA UTARA		
21.	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	21.	BNN KOTA BINJAI		
22.	BNN KOTA TANJUNG	22.	BNN KABUPATEN		

	BALAI		LANGKAT
23.	BNN PROVINSI SULAWESI UTARA	23.	BNN KOTA TARAKAN
24.	BNN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	24.	BNN KOTA TEBING TINGGI
25.	BNN PROVINSI SUMATERA SELATAN	25.	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN
26.	BNN KOTA PAGARALAM	26.	BNN KABUPATEN ASAHAN
27.	BNN PROVINSI JAWA TIMUR	27.	BNN KABUPATEN KARANGASEM
28.	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	28.	BNN KOTA BATU
29.	BNN PROVINSI JAMBI	29.	BNN KABUPATEN PASURUAN
30.	BNN PROVINSI SULAWESI BARAT	30.	BNN KABUPATEN GAYO LUES
31.	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	31.	BNN KABUPATEN BOALEMO
32.	BNN PROVINSI SUMATERA UTARA	32.	BNN KABUPATEN GRESIK
33.	BNN PROVINSI BALI	33.	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN
34.	BNN PROVINSI GORONTALO	34.	BNN KABUPATEN NGANJUK
		35.	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
		36.	BNN KABUPATEN NUNUKAN
		37.	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS
		38.	BNN KOTA PRABUMULIH
		39.	BNN KABUPATEN MUARA ENIM
		40.	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG

Keterangan Zonasi Objek Pengawasan:

1. **Satker Binaan** = Satker zona merah yang merupakan satker mandatori yang pengawasannya wajib untuk dilakukan audit;
2. **Satker Sentuhan** = Satker zona kuning yang pengawasannya dilakukan melalui audit dan/atau pengawasan lainnya;
3. **Satker Pantauan** = Satker zona hijau yang pengawasannya dilakukan melalui pengawasan lainnya berupa konsultasi dan asistensi.

**REKAPITULASI KEGIATAN PENGAWASAN INTERNAL
INSPEKTORAT UTAMA BNN TA.2024**

No.	Kegiatan	Jangka Waktu Pelaksanaan	Jenis Pelaksanaan	Jumlah Satker	Anggaran (Rp)	Kategori	Keterangan
INSPEKTORAT I							
1	Audit Kinerja Atas Aspek Perencanaan Satker Pusat	Februari 2024	Dalam Kantor, Dinas	4	34,465,600	Zona Merah (Binaan)	Deputi Pemberantasan, Deputi Bidang Rehabilitasi, K-9, Balai Besar Rehabilitasi Lido
2	Audit Kinerja Atas Aspek Perencanaan Satker Wilayah Inspektorat I	Maret 2024	Dinas	8	305,159,650	Zona Merah (Binaan)	1. BNNP Lampung, 2. Loka Kalianda, 3. BNNP Kepri, 4. BNNP Riau, 5. BNNK Pelalawan, 6. BNNP Kalteng, 7. BNNK Palangkaraya, 8. BNNP Jawa Tengah
3	Audit Kinerja atas Program dan/atau Kegiatan Prioritas Nasional	Juni- Juli 2024	Dinas	8	282,264,450	Zona Merah (Binaan)	1. BNNK Banyumas, 2. BNN Kota Tegal, 3. BNNK Kendal, 4. BNNK Cilacap, 5. BNNP Jawa Barat, 6. BNNK Kuningan, 7. BNNK Cianjur, 8. BNNP Kalimantan Timur
4	Audit Ketaatan PNPB	Oktober 2024	Dinas	3	142,139,600	Zona Merah (Binaan)	1. BNN Kota Bontang, 2. BNN Kota Samarinda, 3. BNNP Sulawesi Sleatan
5	Audit Kinerja Operasional Satker Wilayah Inspektorat I	Agustus-September 2024	Dinas	8	399,768,100	Zona Merah (Binaan)	1. BNNP Bengkulu, 2. BNNK Bengkulu Selatan, 3. BNNP Maluku Utara, 4. BNNK Morotai, 5. BNNK Halmahera Utara, 6. BNN Kota Tidore Kepulauan, 7. BNNK Balangan,
6	Audit Kinerja atas Pengelolaan Barang Bukti	Nov-24	Dalam Kantor	1	-	Zona Merah (Binaan)	Deputi Pemberantasan
7	Audit Kinerja Atas Pelaksanaan IBM	Nvember 2024	Dalam Kantor	1	-	Zona Merah (Binaan)	Deputi Rehabilitasi
8	Audit Kinerja Operasional Satker Pusat	Nov-24	Dinas	4	34,465,600	Zona Merah (Binaan)	Deputi Pemberantasan, Deputi Bidang Rehabilitasi, K-9, Balai Besar Rehabilitasi Lido
9	Reviu LKj	Februari 2024	Dalam Kantor	-	-		
10	Evaluasi SAKIP	Maret 2024	Dalam Kantor	-	-		
11	Pokja SAKIP	Januari s.d. Desember 2024	Dalam Kantor	-	-		
12	Pokja RB/ZI	Januari s.d. Desember 2024	Dalam Kantor	-	-		
13	Pokja TPI RB-ZI	Januari s.d. Desember 2024	Dalam Kantor	-	-		
14	Pengawasan Lainnya	Januari s.d. Desember 2024	Dinas	9	150,000,000	Zona Merah (Binaan)	1. BNNP Lampung, 2. Loka Kalianda, 3. BNNP Kepri, 4. BNNP Riau, 5. BNNK Pelalawan, 6. BNNP Kalteng, 7. BNNK Palangkaraya, 8. BNNP Jawa Tengah, 9. BNNK

INSPEKTORAT II							
1	Audit Kinerja Atas Aspek Perencanaan Satker Pusat	Februari 2024	Dalam Kantor, Dinas	3	40,262,700	Zona Merah (Binaan)	1. Settama, 2. Ittama, 3. PPSDM
2	Audit Kinerja Atas Aspek Perencanaan Satker Wilayah Inspektorat II	Maret 2024	Virtual	8	-	Zona Merah (Binaan)	1. BNNP Papua Barat, 2. BNNP Papua, 3. BNNK Jayapura, 4. BNNK Buru Selatan, 5. BNNK Tojo Una-Una, 6. BNNK Palu, 7. BNNK Donggala, 8. BNNK Kolaka
3	Audit Kinerja atas Aspek Keuangan Tertentu (PNBP)	Oktober 2024	Dinas	4	169,581,800	Zona Merah (Binaan)	1. BNN Kota Banjarmasin, 2. BNNK Snaggau, 3. BNNK Bengkayang, 4. BNN Kota Pontianak
4	Audit Kinerja atas Program dan/atau Kegiatan Prioritas Nasional	Juni s.d. Juli 2024	Dinas	8	351,050,800	Zona Merah (Binaan) dan 1 Kuning (Sentuhan)	1. BNNK Pasaman Barat, 2. BNNK Bangka Selatan, 3. BNNK Bima, 4. BNNK Sintang, 5. BNNK Tabalong, 6. BNNK Hulu Sungai Utara, 7. BNNK Kubu Raya, 8. BNN Kota Tangerang Selatan
5	Audit Kinerja atas Operasional Satuan Kerja Satker Wilayah Inspektorat II	Agustus-September 2024	Dinas	12	600,825,000	Zona Merah (Binaan) dan 3 Zona Kuning	1. BNNP DIY, 2. BNNP Bangka Belitung, 3. BNNP Banten, 4. BNNP Sumatera Barat, 5. BNNP NTB, 6. BNNP Kalimantan Selatan, 7. BNNP Kalimantan Barat, 8. BNNP Sulawesi Tengah, 9. BNNP Sulawesi Tenggara, 10. BNNP Maluku, 11. BNNK Sleman, 12. BNNK Bantul
6	Audit Kinerja atas Operasional Satuan Kerja Satker Pusat	Nov-24	Dalam Kantor, Dinas	3	36,462,700	Zona Merah (Binaan)	Settama, Ittama, PPSDM
7	Pokja SPIIP MR	Februari s.d. November 2024	Dalam Kantor	-	-	-	
8	Pokja PBJ	Februari s.d. November 2024	Dalam Kantor	-	-	-	
9	Pokja PTL	Februari s.d. November 2024	Dalam Kantor	-	-	-	
10	Pengawasan Lainnya	Februari s.d. November 2024	Dalam Kantor, Dinas	-	150,080,000	Zona Merah (Binaan)	1. BNNP Sumatera Barat, 2. BNNP Bangka Belitung, 3. BNNP Banten, 4. BNNP DIY, 5. BNNP Kalimantan Barat, 6. PPSDM
INSPEKTORAT III							
1	Audit Kinerja Atas Aspek Perencanaan Satker Pusat	Februari 2024	Dalam Kantor	5	-	Zona Merah (Binaan)	1. Deputi Dayamas, 2. Deputi Pencegahan, 3. Deputi Huker, 4. Puslitdatin, 5. Pusat Laboratorium
2	Audit Kinerja Atas Aspek Perencanaan Satker Wilayah Inspektorat III	Maret 2024	Dinas	8	350,050,800	Zona Merah (Binaan)	1. BNNP Sumatera Utara, 2. BNNP DKI Jakarta, 3. BNNP Sumatera Selatan, 4. BNNP Jawa Timur, 5. BNNP Sulawesi Utara, 6. BNNP Jambi, 7. BNNP Sulawesi Barat,
3	Audit Kinerja Program Tertentu/Program Prioritas Nasional	Juni s.d. Juli 2024	Dinas	8	335,569,600	Zona Merah (Binaan)	1. BNNK Mandailing Natal, 2. BNN Kota Malang, 3. BNN Kota Sabang, 4. BNNK Lumajang, 5. BNNK Karo, 6. BNNK Empat Lawang, 7. BNNK Bireuen, 8. BNNK Aceh
4	Audit Kinerja atas Operasional Satuan Kerja Satker Wilayah Inspektorat III	Agustus 2024	Dinas	8	365,788,200	Zona Merah (Binaan)	1. BNNP Bali, 2. BNNP Gorontalo, 3. BNNP Kalimantan Utara, 4. BNNK Tanjung Jabung Timur, 5. BNNK Simalungun, 6. BNNK Pidie Jaya, 7. BNNK Tanjung Balai,
5	Audit Kinerja atas Operasional Satuan Kerja Satker Pusat	Oktober s.d. November 2024	Dalam Kantor, Dinas	5	23,859,600	Zona Merah (Binaan)	1. Deputi Dayamas, 2. Deputi Pencegahan, 3. Deputi Huker, 4. Puslitdatin, 5. Pusat Laboratorium

6	Audit Kinerja Aspek PNPB	Sep-24	Dinas	4	172,369,800	Zona Merah (Binaan)	1. BNNK Buleleng, 2. BNNK Trenggalek, 3. BNNK Bone Bolango, 4. BNNK Pagar Alam
7	Reviu LK BNN	Februari, April, Juli, Oktober 2024	Dalam Kantor	-	-	-	-
8	Reviu RKA-K/L	Agustus, Oktober 2024	Dalam Kantor	-	-	-	-
9	Reviu PNPB	Januari s.d. Desember 2024	Dalam Kantor	-	-	-	-
10	Pokja APIP	Januari s.d. Desember 2024	Dalam Kantor	-	-	-	-
11	Pokja UKI	Januari s.d. Desember 2024	Dalam Kantor	-	-	-	-
12	Pengawasan Lainnya	Januari s.d. Desember 2024	Dinas	5	100,625,000	Zona Merah (Binaan)	1. BNNP Sumatera Utara, 2. BNNP Jawa Timur, 3. BNNP Bali, 4. BNNP Sumatera Selatan, 5. BNNP Jambi
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KHUSUS							
1	Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu Itwasriksus	Insidentil	Jaldis		591,468,000	-	sesuai Perintah/UPP yg masuk
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Itwasriksus	Insidentil	Jaldis		161,252,000	-	yang belum tindak lanjut rekomendasi
3	Pelaksanaan Pemantauan Pengawasan dan Pengamanan Penegakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai BNN	Jan s.d Des, Insidentil	Rapat 12x. Jaldis		76,322,000	-	was pam
4	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Itwasriksus	Jan s.d Des, Insidentil	Rapat 12x. Jaldis		70,958,000	-	sesuai perintah (rekam jejak, audit sertijab dll)
LAYANAN UMUM-962							
1	Fasilitasi Surveillance Audit ISO 37001 dan ISO 9001	Januari 2024	Layanan / Swakelola	-	32,500,000	Dukungan Manajemen Pengawasan Internal	
2	Fasilitasi Bimbingan Teknis (Bimtek) / Pelatihan Substansi	Mengikuti Kalender Akademik Penyelenggara	Layanan / Swakelola	-	117,000,000	Dukungan Manajemen Pengawasan Internal	
3	Fasilitasi Dukungan Kinerja Inspektorat Utama	Sepanjang Tahun	Layanan / Swakelola	-	1,345,128,000	Dukungan Manajemen Pengawasan Internal	
4	Fasilitasi Manajemen Kinerja dan Anggaran Inspektorat Utama	Sepanjang Tahun	Layanan / Swakelola	-	727,500,000	Dukungan Manajemen Pengawasan Internal	
5	Asistensi Penyusunan Laporan Pengawasan Internal Ittama TA.2024	Desember 2024	Layanan / Swakelola	-	253,150,000	Dukungan Manajemen Pengawasan Internal	

6	Fasilitasi Penyusunan LKIP 2023 Inspektorat Utama	Februari 2024	Layanan / Swakelola	-	172,925,000	Dukungan Manajemen Pengawasan Internal	
7	Fasilitasi Penyusunan PKPT 2023 Inspektorat Utama	September 2024	Layanan / Swakelola	-	183,425,000	Dukungan Manajemen Pengawasan Internal	
BAGIAN TATA USAHA ITTAMA - 994							
1	Layanan Perkantoran	Sepanjang Tahun	Layanan / Swakelola	-	1,621,684,000	Layanan Perkantoran	
GRAND TOTAL					9,398,101,000		

Inspektorat	No	No	Kegiatan	Satker	Provinsi	Jadwal												Jumlah Pegawai	Jumlah Hari	Anggaran
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des			
Inspektorat I	1	1	Audit Kinerja Atas Aspek Perencanaan	Deputi Pemberantasan	DKI Jakarta											5	7	0		
	2	2	Audit Kinerja Atas Aspek Perencanaan	Deputi Rehabilitasi	DKI Jakarta											5	7	0		
	3	3	Audit Kinerja Atas Aspek Perencanaan	Deputi Pemberantasan (K-9)	Jawa Barat											5	7	17,232,800		
	4	4	Audit Kinerja Atas Aspek Perencanaan	Balai Besar Rehabilitasi Lido	Jawa Barat											5	7	17,232,800		
	5	5	Audit Kinerja Atas Aspek Perencanaan	BNNP Lampung	Lampung											5	7	32,615,750		
	6	6	Audit Kinerja Atas Aspek Perencanaan	Loka Rehabilitasi Kalianda	Lampung											5	7	33,011,500		
	7	7	Audit Kinerja Atas Aspek Perencanaan	BNNP Kepulauan Riau	Kepulauan Riau											5	7	41,159,200		
	8	8	Audit Kinerja Atas Aspek Perencanaan	BNNP Riau	Riau											5	7	42,639,200		
	9	9	Audit Kinerja Atas Aspek Perencanaan	BNNK Pelalawan	Riau											5	7	43,393,200		
	10	10	Audit Kinerja Atas Aspek Perencanaan	BNNP Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah											5	7	39,182,400		
	11	11	Audit Kinerja Atas Aspek Perencanaan	BNN Kota Palangka Raya	Kalimantan Tengah											5	7	39,928,400		
	12	12	Audit Kinerja Atas Aspek Perencanaan	BNNP Jawa Tengah	Jawa Tengah											5	7	33,230,000		
	13	13	Audit Kinerja atas Program dan/atau Kegiatan Prioritas Nasional	BNNK Banyumas	Jawa Tengah											5	7	33,230,000		
	14	14	Audit Kinerja atas Program dan/atau Kegiatan Prioritas Nasional	BNN Kota Tegal	Jawa Tengah											5	7	33,230,000		
	15	15	Audit Kinerja atas Program dan/atau Kegiatan Prioritas Nasional	BNNK Kendal	Jawa Tengah											5	7	33,230,000		
	16	16	Audit Kinerja atas Program dan/atau Kegiatan Prioritas Nasional	BNNK Cilacap	Jawa Tengah											5	7	33,230,000		
	17	17	Audit Kinerja atas Program dan/atau Kegiatan Prioritas Nasional	BNNP Jawa Barat	Jawa Barat											5	7	34,091,600		
	18	18	Audit Kinerja atas Program dan/atau Kegiatan Prioritas Nasional	BNNK Kuningan	Jawa Barat											5	7	34,091,600		
	19	19	Audit Kinerja atas Program dan/atau Kegiatan Prioritas Nasional	BNNK Cianjur	Jawa Barat											5	7	34,091,600		
	20	20	Audit Kinerja atas Program dan/atau Kegiatan Prioritas Nasional	BNNP Kalimantan Timur	Kalimantan Timur											5	7	47,069,650		
	21	21	Audit Ketaatan PNBP	BNN Kota Bontang	Kalimantan Timur											5	7	47,069,650		
	22	22	Audit Ketaatan PNBP	BNN Kota Samarinda	Kalimantan Timur											5	7	48,018,900		
	23	23	Audit Ketaatan PNBP	BNNP Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan											5	7	47,051,050		
	24	24	Audit Kinerja Aspek Operasional	BNNP Bengkulu	Bengkulu											5	7	39,429,700		
	25	25	Audit Kinerja Aspek Operasional	BNNK Bengkulu Selatan	Bengkulu											5	7	39,429,700		
	26	26	Audit Kinerja Aspek Operasional	BNNP Maluku Utara	Maluku Utara											5	7	57,816,000		
	27	27	Audit Kinerja Aspek Operasional	BNNK Morotai	Maluku Utara											5	7	57,816,000		
	28	28	Audit Kinerja Aspek Operasional	BNNK Halmahera Utara	Maluku Utara											5	7	57,816,000		
	29	29	Audit Kinerja Aspek Operasional	BNN Kota Tidore Kepulauan	Maluku Utara											5	7	57,816,000		
	30	30	Audit Kinerja Aspek Operasional	BNNK Balangan	Kalimantan Selatan											5	7	41,190,700		
	31	31	Audit Kinerja Aspek Operasional	BNNK Pidie	Aceh											5	7	48,454,000		
	32	32	Audit Kinerja atas Pengelolaan Barang Bukti	Deputi Pemberantasan	DKI Jakarta											5	5	0		
	33	33	Audit Kinerja Atas Pelaksanaan IBM	Deputi Rehabilitasi	DKI Jakarta											5	5	0		
	34	34	Audit Kinerja Operasional	Balai Besar Rehabilitasi Lido	Jawa Barat											5	5	17,232,800		
	35	35	Audit Kinerja Operasional	Deputi Pemberantasan (K-9)	Jawa Barat	</														

[illegible]

TIMELINE LAYANAN PERKANTORAN DAN UMUM INSPEKTORAT UTAMA BNN
T.A. 2024

Inspektorat	No	No	Kegiatan	Jadwal												Anggaran	Minggu ke	Keterangan
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des			
962(UMUM)	1	A	Fasilitasi Surveillance Audit ISO 37001 dan ISO 9001													32,500,000	II	Salah satu rencana aksi yang ditekankan untuk pencegahan tindakan korupsi adalah pengembangan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan diadopsi identik dari standar ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System menjadi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. SNI ISO 37001:2016 membantu organisasi mengendalikan praktek penyuapan dengan menyediakan serangkaian langkah penting diantaranya penetapan kebijakan anti-penyuapan, pembinaan, dan pelatihan anggota organisasi, dan lain-lain, selain ISO 37001:2016 Inspektorat Utama BNN dalam rangka menjamin kualitas audit internal dan sertifikasi auditor juga menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, untuk Melaksanakan rangkaian kegiatan Updating Document dalam rangka penerapan ISO 9001:2015 dan 37001:2016 pada pelayanan audit Internal di lingkungan Ittama BNN, maka dilaksanakan fasilitasi surveillance audit ISO 37001 dan ISO 9001 di lingkungan Inspektorat Utama BNN.
	2	B	Fasilitasi Bimbingan Teknis (Bimtek) / Pelatihan Substansi													117,000,000		Pelaksanaan diklat fungsional atau penjenjangan.
	3	C	Fasilitasi Dukungan Kinerja Inspektorat Utama													1,345,128,000		Untuk Fasilitasi dukungan kinerja Inspektorat Utama anggaran yang disediakan berupa ATK, konsumsi rapat pimpinan, rapat BPK, dan rapat staff, Lisensi Zoom serta perjalanan dinas pimpinan.
	4	D	Fasilitasi Manajemen Kinerja dan Anggaran Inspektorat Utama													727,500,000	III	Kegiatan Manajemen Kinerja dan anggaran Inspektorat Utama BNN adalah untuk mengevaluasi secara berkala capaian kinerja serta penyerapan/realisasi anggaran yang sudah dilaksanakan sesuai dengan PKPT yang telah ditetapkan.
	5	E	Asistensi Penyusunan Laporan Pengawasan Internal Ittama TA.2024													253,150,000	III	Asistensi Penyusunan Laporan Pengawasan Internal Ittama TA.2024 diperlukan untuk mengukur capaian pengawasan intern di lingkungan BNN baik itu melalui audit,review,pengawasan lainnya serta monitoring dan evaluasi, selama tahun anggaran berjalan.
	6	F	Fasilitasi Penyusunan LKIP 2023 Inspektorat Utama													172,925,000	II	Fasilitasi Penyusunan LKIP 2023 Inspektorat Utama BNN bertujuan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran.
	7	G	Fasilitasi Penyusunan PKPT 2025 Inspektorat Utama													183,425,000	IV	Kegiatan Penyusunan PKPT 2025 Inspektorat Utama dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/ mengevaluasi kinerja APJP dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
994(PERKANTORAN)	8	A	Operasional dan Keperluan Sehari-hari Perkantoran													80,550,000		Operasional dan Keperluan Sehari-hari Perkantoran mencatat belanja barang keperluan sehari-hari perkantoran yang tidak menghasilkan persediaan selama satu tahun anggaran berjalan.
	9	B	Honor Operasional Pengelolaan Keuangan													98,880,000	I	Honor Operasional Pengelolaan Keuangan adalah pembayaran yang diberikan kepada personil yang terlibat dalam kegiatan pelayanan pengelolaan keuangan pada satu tahun anggaran berjalan.
	10	C	Honor UAPPA-E1													25,800,000	I	Honor UAPPA-E1 adalah pembayaran yang diberikan kepada personil yang terlibat dalam kegiatan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah-Eselon I pada satu tahun anggaran berjalan.
	11	D	Honor Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara													7,200,000	I	Honor Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara adalah pembayaran yang diberikan kepada personil yang terlibat dalam kegiatan Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/ TNI di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada satu tahun anggaran berjalan.
	12	E	Honor Output Kegiatan													8,160,000	I	Honor Output Kegiatan honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan satker Ittama BNN
	13	F	Layanan Pemeliharaan Perkantoran													75,000,000	II	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran sendiri merupakan kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua Barang Milik Negara selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
	14	G	Layanan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga													1,326,094,000		Layanan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga merupakan Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.